



LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI POM di Balikpapan

TRIWULAN II TAHUN
2025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji Syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Balai POM di Balikpapan dapat menyelesaikan target dan rangkaian kegiatannya dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun secara periodik tiap tahun dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan

kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 Balai Pengawas Obat

dan Makanan di Balikpapan Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renja Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Perubahan indikator kinerja pada Renja tahun 2025, tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 menyesuaikan dengan Rencana Startegis Tahun 2025-2029.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Balikpapan pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

Balikpapan, 18 Juli 2025
Kepala Balai POM di Balikpapan



Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
HIGHLIGHT	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	14
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	19
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	20
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	21
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	22
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	23
1.6 ISU STRATEGIS	30
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS	36
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	42
2.3 PERJANJIAN KINERJA	44
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	47
2.5 METODE PENGUKURAN	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025	52
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI.....	117
3.3 REALISASI ANGGARAN	122
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	131
4.2 SARAN	134
LAMPIRAN	136

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI POM DI BALIKPAPAN TRIWULAN II TAHUN 2025

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN LINTAS SEKTOR MELALUI FORUM ADVOKASI, KONSULTASI PUBLIK, DAN PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS

Balai POM di Balikpapan menggelar kegiatan bertajuk “Sinergitas Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Melalui Forum Advokasi, Konsultasi Publik, dan Pencanaan Zona Integritas ” secara luring bertempat di Swiss Bell-Inn, Balikpapan dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi demi melindungi kesehatan masyarakat.



Acara yang berlangsung pada hari Selasa, 15 April 2025 ini mengusung tiga agenda utama strategis yaitu:

1. Advokasi Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
2. Forum Konsultasi Publik Layanan BPOM Balikpapan.
3. Pencanaan Zona Integritas BPOM Balikpapan.

Acara ini dihadiri sejumlah 61 orang dari lintas sektor Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser yang dimana terdiri dari 41 orang hadir secara luring dan 20 orang hadir secara daring. Kehadiran Walikota Balikpapan diwakili oleh Wakil Walikota Balikpapan Dr. Ir. Bagus Susetyo, M.M serta Ibu

Ruki Fanaike, STP, M.Si. dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM RI hadir secara daring sebagai narasumber materi Advokasi Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.



Sinergi yang kuat antara Balai POM di Balikpapan, pemerintah daerah, lintas sektor, dan masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem obat dan makanan yang aman dan berkualitas di Balikpapan.

SOSIALISASI EDUKATIF KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan sejak dini, Balai POM di Balikpapan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada hari Rabu, 23 April 2025 bertempat di Rumah BUMN Balikpapan.



Kegiatan edukatif ini dilaksanakan dengan melibatkan 22 peserta, yang terdiri dari siswa dan perwakilan guru serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan dan tenaga sanitasi lingkungan Puskesmas Batu Ampar. Dalam kegiatan ini, peserta diajak menyelami 4 materi utama yang dikemas secara interaktif dan mudah dipahami yaitu Pengenalan Bahaya Keamanan Pangan, Mengenal dan Memilih Pangan Aman dengan 5 Kunci Keamanan Pangan (5 Kunci KP), Tips Konsumsi Pangan Aman dengan Memperhatikan Informasi Nilai Gizi serta CEK KLIK, dan Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.



Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas memilih dan mengonsumsi pangan yang aman, sehat, dan bergizi. Balai POM di Balikpapan berharap melalui sosialisasi ini, peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat di lingkungan sekolah dan rumah, serta menjadi agen perubahan dalam pembudayaan keamanan pangan di masyarakat.

BIMBINGAN TEKNIS KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH

Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak bangsa, Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah di SDN 009 Balikpapan Utara, Kamis (24/4/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang

secara aktif melibatkan berbagai elemen sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam hal keamanan pangan.



Kegiatan ini diikuti oleh 6 peserta. Sebagai salah satu sekolah yang akan diintervensi, SDN 009 Balikpapan Utara menjadi lokasi strategis pelaksanaan bimtek yang bertujuan membekali para kader sekolah yang terdiri dari guru dan wali murid. Pada kesempatan ini, peserta bimtek mendapatkan pembekalan melalui 5 materi yang mencakup Kebijakan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Kunci Mengolah Pangan Aman, Nutrisi Seimbang untuk SDM Unggul, Peran Kader Keamanan Pangan Sekolah dalam Intervensi Keamanan PJAS, dan Pentingnya Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah.



Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kader keamanan pangan sekolah dapat menjadi agen perubahan yang berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pola hidup sehat. BPOM Balikpapan akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan untuk memastikan implementasi hasil bimtek berjalan optimal di sekolah-sekolah intervensi.

NARASUMBER PADA KEGIATAN EVALUASI FORUM KEMITRAAN UMKM

Balai POM di Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan Evaluasi Forum Kemitraan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan di Ballroom Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kamis (24/4/2025).



Dalam kesempatan ini, Denisa Ayu F, S.T.P sebagai narasumber membawakan materi mengenai Sosialisasi Tahapan dan Persyaratan Registrasi Izin Edar BPOM yang diikuti kurang lebih 25 peserta.



Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kemitraan antara UMKM dan instansi terkait, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai proses registrasi izin edar BPOM.

PEMBERDAYAAN KADER DESA MELALUI PELATIHAN KADER KEAMANAN PANGAN

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan, Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, yang merupakan bagian dari Program Nasional Keamanan Pangan (Pro-PN) di Kelurahan Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan, Rabu (30/04/25).



Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam memberdayakan masyarakat agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pengawasan dan edukasi keamanan pangan. Para peserta pelatihan yang akan menjadi kader berasal masyarakat, keluarga dan sekolah yang dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait materi Pedoman Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman, Pencegahan Stunting, Mencegah dan Menangani Keracunan Pangan serta 5 Kunci Keamanan Pangan untuk Keluarga, Sekolah, Siap Saji, dan Ritel yang diikuti kurang lebih 20 peserta. Pelatihan ini juga bertujuan menciptakan kader-kader yang dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM di tingkat komunitas dalam menyampaikan pesan-pesan keamanan pangan serta membantu mencegah kejadian luar biasa (KLB) akibat pangan yang tidak aman.



Dengan pelatihan ini, kader diharapkan jadi agen perubahan dan mendorong kesadaran pangan aman dan mencegah risiko kesehatan akibat pangan tidak layak konsumsi.

BALAI POM DI BALIKPAPAN ADAKAN BIMTEK CPPOB SECARA DARING

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pangan olahan, Balai POM di Balikpapan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin & Selasa (28-29/04/2025).



Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para pelaku industri pangan olahan tentang prinsip-prinsip CPPOB yang merupakan fondasi dalam menghasilkan produk pangan yang tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memenuhi standar mutu yang ditetapkan yang diikuti sebanyak kurang lebih 25 peserta. Selain itu, para peserta juga diajak berdiskusi melalui sesi interaktif tanya jawab bersama narasumber, serta menyimak studi kasus pada industri pangan olahan.



Melalui kegiatan ini, Balai POM di Balikpapan berharap pelaku usaha pangan, khususnya UMKM di Balikpapan, Kab. Penajam Paser

Utara, dan Kab. Paser mampu menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan produksinya secara konsisten, sehingga produk yang dihasilkan semakin kompetitif dan mendapat kepercayaan konsumen.

NARASUMBER PADA KEGIATAN KIE DI KAB. PPU

Dalam mendukung program Kabupaten/Kota Sehat dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya komunitas pedagang pasar akan pentingnya keamanan pangan, Balai POM di Balikpapan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi “Waspada Bahan Berbahaya Pada Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di UPTD Pasar Penajam, Kamis (01/05/25).



Dalam kesempatan ini, Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H bersama Riskha Rinanda, S.K.M membawakan materi tentang 5 Kunci Keamanan Pangan di Pasar, Keamanan Pangan dan Ciri Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya, dan Mengenal NIE, Cek Klik serta BPOM Mobile. Kegiatan ini diikuti kurang lebih 30 peserta terdiri dari Dinas Diperindagkop Kab. PPU dan Pedagang Pasar Penajam.



Melalui sesi dialog dan edukasi interaktif, Balai POM di Balikpapan mendorong semua elemen baik pemerintah daerah dan pedagang untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung akses terhadap pangan yang aman.

Partisipasi ini menjadi bentuk nyata sinergi antar instansi dalam mewujudkan Kab. Penajam Paser Utara sebagai daerah yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

BPOM BALIKPAPAN GELAR BIMTEK UNTUK KOMUNITAS DESA

Sebagai kelanjutan dari Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang telah dilaksanakan pada 30 April 2025, BPOM Balikpapan kembali melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Komunitas Desa di Aula Pertemuan Kantor Kelurahan Gunung Sari Ilir, Rabu (07&14/05/2025).



Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 2 orang dari Tim Keamanan Pangan Kelurahan Gunung Sari

Ilir, 5 Kader Keamanan Pangan Desa (2 Kader Keluarga, 2 Kader Masyarakat, dan 1 Kader Sekolah), dan 1 Sanitarian Puskesmas Gunung Sari Ilir. yang didampingi oleh pendamping dari Balai POM di Balikpapan dalam melakukan bimbingan teknis untuk komunitas desa.



Dengan terselenggaranya kegiatan pelatihan ini, diharapkan para kader keamanan pangan desa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara berkelanjutan, serta berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan di tingkat desa demi terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

BPOM BALIKPAPAN GELAR EDUKASI KEAMANAN PANGAN MELALUI BIMTEK DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada komunitas pasar terhadap pentingnya keamanan pangan, Balai POM di Balikpapan menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar bertempat di UPTD Pasar Wilayah IV Kota Balikpapan.



Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 20 peserta yang terdiri dari Dinas Perdagangan, pedagang pasar Sepinggan, perwakilan

paguyuban komunitas pedagang Pasar Sepinggan, dan Perwakilan UPTD Wilayah I, II, III, dan IV.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Nasional BPOM untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat melalui edukasi langsung kepada pedagang di pasar tradisional. Dalam sesi bimbingan teknis, para peserta diberikan materi penting terkait Pengenalan Program PPABK (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas), Keamanan Pangan dan Ciri Pangan mengandung Bahan Berbahaya, Pengenalan NIE, Cek KLIK, BPOM Mobile dan cek SPP-IRT dan Praktek Cek KLIK serta 5 Kunci Keamanan Pangan di Sarana Peredaran.

Dengan terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan para peserta dari komunitas pasar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara berkelanjutan, serta berperan aktif dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keamanan pangan di wilayah komunitas pasar khususnya Pasar Sepinggan demi terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

GELAR KIE DALAM RANGKA HARI JAMU NASIONAL 2025

Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2025, Balai POM di Balikpapan menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema “Jamu: Kearifan Lokal untuk Kesehatan Bangsa” dalam wujud nyata komitmen Balai POM di Balikpapan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan secara alami melalui pemanfaatan jamu, warisan leluhur Indonesia yang kaya manfaat.



Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh perwakilan dari Dinas Perdagangan Bapak Sugito dan pembukaan oleh Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak, S.Si dengan peserta sejumlah 21 orang dari Dinas Perdagangan, UPTD Wilayah I, II, III, dan IV, serta pedagang pasar Sepinggan.



Dengan terselenggaranya kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi “Jamu : Kearifan Lokal untuk Kesehatan Bangsa Dalam Rangka Hari Jamu Nasional 2025” ini, diharapkan para peserta dari komunitas pasar dapat mendapatkan informasi mengenai Jamu, Obat Bahan Alam/Herbal sehingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu waspada terhadap Jamu yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), demi terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

SAMBUT GENERASI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, SIAP MENGABDI UNTUK NEGERI!

Tahun ini Balai POM di Balikpapan dengan penuh semangat menyambut kehadiran 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 yang siap bergabung dan berkontribusi dalam tugas mulia menjaga

keamanan, mutu, dan kualitas obat serta makanan, Rabu (28/05/25).



Penyambutan CASN TA 2024 dan Pelepasan Purnabakti di Lingkungan Badan POM yang dilaksanakan secara hybrid dengan mengusung tema “Bersama BPOM Mengabdikan untuk Negeri, Menjaga Generasi” yang diikuti oleh Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H dan jajaran bersama 6 orang CPNS TA 2024 secara daring bertempat di Ruang Rapat Balai POM di Balikpapan. Dalam kegiatan ini dilakukan juga penyerahan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberikan secara simbolis. Bersama Badan POM, mari Menjulangi, Membumi, dan Mengakar untuk Indonesia Emas 2045!

SINERGI DALAM PEMANTAUAN SPHP MENJELANG HARI RAYA IDUL ADHA 1446 H

Dalam upaya menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan serta menjamin keamanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Hari Raya Idul Adha 1446 H, Balai POM di Balikpapan turut serta dalam kegiatan Pemantauan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur di pasar tradisional dan retail modern, Rabu (04/06/2025).



Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan kolaboratif lintas sektor untuk memastikan tidak hanya pasokan pangan yang cukup, tetapi juga harganya tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen dan aman dikonsumsi. Peran BPOM Balikpapan dalam SPHP ini berfokus pada aspek keamanan dan mutu pangan yang dimana dilakukan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar, mulai dari kemasan, label, izin edar, hingga tanggal kedaluwarsa.



Sebagai konsumen cerdas, masyarakat dihimbau untuk selalu Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk pangan.

WUJUDKAN PASAR PANGAN AMAN MELALUI SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

Dalam rangka pengawasan keamanan pangan di pasar, Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan pengawasan Implementasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Tahun 2025 yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola pasar UPTD Wilayah IV melalui sosialisasi tentang keamanan pangan, bahan berbahaya dan Cek

KLIK di Pasar Sepinggan, Rabu (11&18/06/2025).



Kegiatan ini menyasar komunitas pasar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa) sebelum membeli/mengonsumsi obat dan makanan serta menyediakan pangan yang aman, bebas dari bahan berbahaya.

WUJUDKAN PENJUALAN OBAT YANG TERTIB MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI

dalam upaya memperkuat pengawasan obat dan meningkatkan pemahaman masyarakat, Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi & Edukasi Penjualan Obat di Toko Kelontong yang diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas Perawatan Kariangau di Aula Puskesmas Kariangau Lt.2, Selasa (24/06/2025).

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 20 peserta yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Lurah Kariangau, pemilik toko kelontong, dan masyarakat umum. Melalui pendataan tahun 2024, dari 61 toko kelontong di Kelurahan Kariangau terdapat 67,2% menjual obat dan 24,6% menjual antibiotik.



Kegiatan ini juga menjadi momentum dialog dua arah antara Balai POM di Balikpapan, pelaku usaha, dan masyarakat dimana membuka ruang diskusi serta pemahaman yang lebih dalam mengenai risiko penjualan obat yang tidak sesuai ketentuan. Harapannya, para pelaku usaha dan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyediakan produk yang beredar di masyarakat serta membeli obat, serta turut menjadi bagian dari rantai distribusi obat yang aman dan terpercaya.



Balai POM di Balikpapan terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, mengedukasi, dan memberikan pendampingan agar semua pihak dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

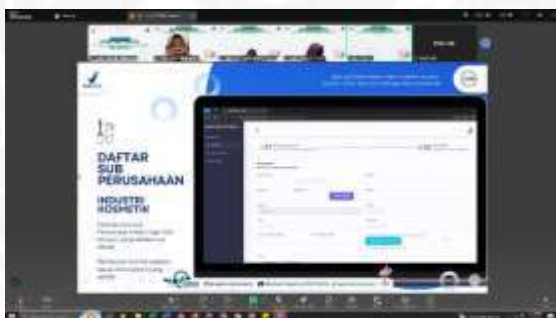
BALAI POM DI BALIKPAPAN GELAR BIMTEK CPKB SECARA DARING

Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku usaha kosmetik terhadap standar Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Balai POM di Balikpapan kembali menunjukkan

komitmennya dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis CPKB secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (24/06/25).



Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha kosmetik, UMKM, serta pihak-pihak terkait di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan. Melalui sesi ini, peserta dibekali pengetahuan penting terkait prinsip-prinsip dasar CPKB, mulai dari pengendalian mutu, kebersihan fasilitas produksi, hingga dokumentasi dan pelabelan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Dengan semangat edukatif dan kolaboratif, kegiatan ini menjadi salah satu upaya nyata Balai POM di Balikpapan dalam mendukung pengembangan industri kosmetik lokal yang berdaya saing tinggi, sekaligus memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.

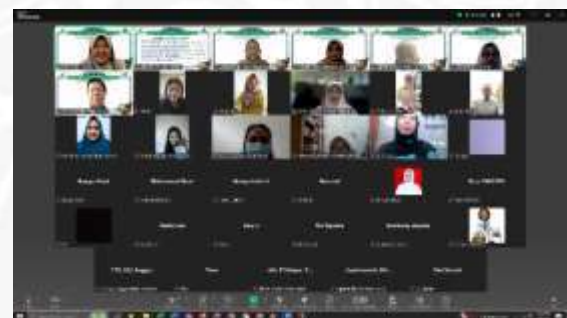
DORONG INDUSTRI OBA MELALUI BIMTEK CPOTB BERTAHAP SECARA DARING

komitmen Balai POM di Balikpapan dalam mendukung pengembangan industri Obat Bahan Alam (OBA) terus diwujudkan secara nyata. Salah satunya melalui Bimbingan Teknis Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap yang dilaksanakan secara

daring melalui Zoom Meeting, Rabu (27/06/25).



Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha OBA, UMKM, serta pihak-pihak terkait di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan. Melalui bimtek ini, peserta dibekali pengetahuan teknis dan regulatif tentang standar CPOTB, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi yang higienis, hingga tata kelola dokumentasi yang sesuai dengan peraturan. Meskipun diselenggarakan secara daring, interaksi antara narasumber dan peserta tetap berjalan aktif dan dinamis. Peserta pun antusias mengikuti setiap sesi dengan semangat belajar tinggi, menyadari pentingnya CPOTB sebagai fondasi untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.



Dengan terselenggaranya bimtek ini, Balai POM di Balikpapan berharap dapat mendorong semakin banyak pelaku industri OBA untuk menerapkan standar produksi yang baik, serta menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, Balai POM di Balikpapan merupakan salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi dan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Balikpapan kepada Kepala Badan POM, para pemangku kepentingan dan masyarakat, selain sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, LAKIP ini juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP Tahun 2025 Balai POM di Balikpapan ini memuat Gambaran Umum Organisasi; Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis yang dituangkan pada Bab I sebagai Pendahuluan. Bab II menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, sedangkan Bab III mengukur akuntabilitas Capaian Kinerja Organisasi; Tindak Lanjut Rekomendasi dan Hasil Evaluasi Sebelumnya; Pemanfaatan Informasi Kinerja dan Realisasi Anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Balikpapan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi manfaat untuk pencapaian sasaran kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan POM. Berdasarkan Renstra 2025-2029, terdapat 8 sasaran strategis kegiatan dengan 23 indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Balikpapan. Adapun hasil capaian sasaran pada Triwulan II Tahun 2025 pada masing masing indikator kegiatan, yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,02% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 102,23% dengan kriteria **Sangat Baik**

Ikhtisar Eksekutif

- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT sebesar 0% (Tidak ada kasus KLB)
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 106,67% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 130,95% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 0% (Tidak ada realisasi)
 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,47 dengan kriteria **Baik**
 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,04% dengan kriteria **Baik**
 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 120,81% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 102,35% dengan kriteria **Sangat Baik**
3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan pangan olahan sebesar 100,51% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 85,71% dengan kriteria **Baik**
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**

Ikhtisar Eksekutif

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 103,04% dengan kriteria **Sangat Baik**
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
7. Layanan Publik UPT yang prima di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Pelayanan Publik UPT (Penilaian pada akhir tahun)
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Balikpapan yang optimal diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase implementasi rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Balikpapan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Nilai AKIP UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Indeks Manajemen Risiko UPT (Penilaian pada akhir tahun)

Dari 23 indikator kegiatan, sebanyak 12 indikator kegiatan yang dapat diperhitungkan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Balikpapan periode Triwulan II sebesar 101,24 dengan predikat Sangat Baik.

Secara garis besar Balai POM di Balikpapan sebagian belum berhasil mencapai sasaran kegiatan di tahun 2025, **adapun kendala -kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian sasaran kegiatan yaitu sebagai berikut :**

1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha/pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian.
2. Tindakan perbaikan dan pencegahan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan tidak dilakukan secara konsisten
3. Adanya keputusan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

Ikhtisar Eksekutif

4. Sarana produksi yang diperiksa belum dientry datanya ke SIPT
5. Adanya perubahan DO, dimana Nilai EKA tidak lagi dinilai perbulan, penilaian dilakukan pada akhir tahun
6. Makin banyaknya sampling dengan metode online yang menyulitkan dalam penilaian penandaan
7. Renlak pemeriksaan difokuskan pada sarana produksi yang belum pernah diperiksa, dan saat pemeriksaan memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan
8. Belum dilakukan Bimbingan Teknis untuk komoditi Obat Tradisional dan Kosmetik
9. Terdapat peserta KIE yang mengisi skala "kurang berminat" pada poin minat dalam mengikuti kegiatan KIE
10. Jumlah sampel yang disampling dan diuji belum mencapai 50% dari target tahunan karena adanya beberapa sampel yang belum selesai uji.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk berkomitmen dalam menerapkan perbaikan pada ketidaksesuaian
2. memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi ke UPT Badan POM
3. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
4. Refreshment terkait pedoman evaluasi penandaan kepada petugas evaluasi penandaan
5. Melibatkan SDM dari fungsi lain dalam kegiatan sampling (DK/LK).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sampling dan pengujian yang telah disusun, jika ada hambatan seperti alat laboratorium yang rusak, reagen/bahan penunjang belum tersedia agar dikomunikasikan kepada petugas sampling sebelum kegiatan sampling dilakukan.
7. Bimtek persyaratan penandaan label dan iklan produk kosmetik kepada pelaku usaha
8. Meningkatkan Sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder
9. Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan
10. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat
11. Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media
12. Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website
13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIE.

Ikhtisar Eksekutif

14. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei dan rekomendasi hasil pengukuran indeks untuk peningkatan kesadaran masyarakat kedepannya
15. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kesadaran masyarakat di tahun mendatang
16. Monitoring dan evaluasi di tiap triwulan

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, pada DIPA TA. 2025, Balai POM di Balikpapan memperoleh anggaran sebesar Rp 4.956.412.000,-. dengan realisasi penggunaan anggaran Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp 1.380.669.676,- sehingga pencapaian pada tahun 2025 adalah sebesar 27,86%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, peran Balai POM di Balikpapan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat menjadi sangat penting dan mempunyai posisi strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Letak geografis mengakibatkan terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai Obat dan Makanan ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun hal ini, tidak menjadi hambatan dan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan modernisasi suatu bangsa akan berpengaruh pada pola hidup masyarakat, sehingga tantangan pengawasan menjadi sangat kompleks. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan melakukan upaya-upaya strategis guna tercapainya tugas dan fungsi yaitu melindungi masyarakat Kalimantan Timur dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, substandar, ilegal dan palsu.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Pilar pertama, yaitu sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu

dan keamanan produk yang dihasilkannya. Pilar kedua, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan dan pemberian Nomor Izin Edar (NIE), pengawasan penandaan dan iklan, pengambilan dan pengujian contoh produk di peredaran/sarana distribusi, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan produk ilegal/palsu, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pilar ketiga yaitu, sistem pengawasan oleh masyarakat selaku konsumen melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi/distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kedudukan dari Balai POM di Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Balai POM di Balikpapan adalah salah satu Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan POM
2. Balai POM di Balikpapan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM
3. Secara teknis Balai POM di Balikpapan dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya yaitu Deputi 4 Bidang Penindakan
4. Balai POM di Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala

Mulai tahun 2021, Balai POM di Balikpapan telah ditetapkan menjadi satker mandiri berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja Mandiri Balai Pengawas Obat dan Makanan. DIPA sudah terpisah dari Balai Besar POM di Samarinda dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Kemudian

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM menjadi dasar pembentukan 40 Balai POM di Seluruh Wilayah Indonesia. Balai POM di Balikpapan resmi beroperasi sekitar Bulan Agustus 2018. Berkantor di Jl. Telagasari No. 72 RT 37 Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan hanya mengawasi satu wilayah yaitu Kota Balikpapan dengan Struktur Organisasi berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Balikpapan



Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM dijelaskan mengenai tugas dari Balai POM di Balikpapan sebagai salah satu UPT BPOM. Balai POM di Balikpapan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan menggunakan test kit, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dalam melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029. Dalam

kegiatan operasionalnya terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kota Balikpapan
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kota Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2025 jumlah pegawai Balai POM di Balikpapan berjumlah 14 orang PNS aktif, 3 orang PPPK dan 8 orang outsourcing yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Maka jumlah PNS/PPPK aktif menjadi 17 orang.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Balai POM di Balikpapan Tahun 2025

No.	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Tata Usaha	2
3.	Pengujian	2

4.	Pemeriksaan	6
5.	Penindakan	2
6.	Infokom	4
Jumlah		17

Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Balai POM di Balikpapan Tahun 2025

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	14
2.	PPPK	3
3.	Sopir	1
4.	Satpam	3
5.	Tenaga Kebersihan	1
6.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		25

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Balai POM di Balikpapan juga mengangkat pegawai outsourcing sebagai tambahan pegawai sebanyak 8 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

1.5.1.2. Anggaran

Mulai tahun 2021, Balai POM di Balikpapan telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Anggaran Balai POM di Balikpapan bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.690471/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 sebesar 4.956.412.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

1.5.1.3. Sarana Prasarana

Balai POM di Balikpapan berdiri di atas tanah seluas 578 m2 dengan luas bangunan 184 m2 bertempat di Gedung pinjaman eks

KORPRI Jl. Telagasari No. 72 RT 37 Kota Balikpapan. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah pinjam pakai.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Balai POM di Balikpapan diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Balai POM di Balikpapan dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) mobil jabatan dengan status sewa dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Untuk menunjang pekerjaan Balai POM di Balikpapan peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner, jaringan internet dan penambahan daya listrik dari PLN yang awalnya hanya 5.500 VA dan sudah dinaikkan menjadi 10.600 VA. Sarana komunikasi yang dimiliki Balai POM di Balikpapan antara lain:

- Hotline Kantor : 0542-8793168
- Hotline ULPK : 0857 3135 0104
- Sosial Media
 - a. Instagram : @lokapombalikpapan (status aktif)
 - b. Twitter : @Lokapombpn (status aktif)
 - c. Youtube : Balai POMBalikpapan (status aktif)

Status Kepemilikan Tanah

Kantor Balai POM di Balikpapan yang terletak di Jl. Telaga Sari No.72 RT 37 Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan memiliki status Pinjam Pakai dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk digunakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Balai POM di Balikpapan tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan No: 032 /17/BPKD dan No: PR 07.06.153.19.0206 yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2019 dengan periode sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023. Telah dilakukan koordinasi terkait permohonan perpanjangan pinjam pakai

kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan secara lisan disampaikan bahwa permohonan perpanjangan pinjam

pakai gedung bangunan kantor telah disetujui oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum menyampaikan Surat Keputusan terkait persetujuan perpanjangan pinjam pakai Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-155/KN/2023 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang telah Ditetapkan Status Penggunaan Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor BA-232/KN/2023 Tanggal 20 November 2023, telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah dari Kementerian Keuangan dengan lokasi tanah seluas 11.000 m² yang terletak di Jalan Kompleks Perumahan Bangun Reksa Asri Blok CK, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

1.5.1.4. Eksternal

1.5.1.5. Kondisi Geografis dan Demografis

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Balikpapan memiliki wilayah kerja 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1. Wilayah Pengawasan Balai POM di Balikpapan

UPT	Jumlah Kecamatan	Cakupan Kerja (Kecamatan)
Balai POM di Balikpapan	20	Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat, Babulu, Waru, Penajam, Sepaku, Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau, Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, Long Kali

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

a. Kota Balikpapan

Memiliki luas wilayah sebesar 511.01 km² dan jumlah penduduk sebanyak 753.532 jiwa, terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan dengan kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Balikpapan Tengah merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dan Luas Pengelolaan Laut 160,10 km².

b. Kabupaten Penajam Paser Utara

Memiliki luas wilayah sebesar 3.060,82 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.566 jiwa, terdiri dari 4 kecamatan dan 54 desa/kelurahan demham Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil.

c. Kabupaten Paser

Memiliki luas wilayah sebesar 10.851,8 km² dan jumlah penduduk sebanyak 303.424 jiwa, kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang terdiri dari 139 desa dan 5 kelurahan dari jumlah desa/kelurahan tersebut, Kecamatan Long Ikis mempunyai jumlah desi/kelurahan terbanyak yaitu 26 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai jumlah desa paling sedikit yaitu 7 desa, Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 85.087 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Muara Samu merupakan wilayah degan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 7.770 jiwa.

2. Data Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan

Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah Darat (Km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)	(4)
Balikpapan	Balikpapan Selatan	7	38,81
	Balikpapan Kota	5	11,10
	Balikpapan Timur	4	119,16

	Balikpapan Tengah	6	10,83
	Balikpapan Barat	6	192,88
	Balikpapan Utara	6	138,24
Penajam Paser Utara	Babulu	12	399,45
	Waru	4	553,88
	Penajam	23	1.207,37
	Sepaku	15	1.172,36
Paser	Batu Sopang	9	1111,38
	Muara Samu	7	835,25
	Batu Engau	8	480,4
	Tanjung Harapan	1	1501,61
	Pasir Belengkong	1	836,62
	Tanah Grogot	1	326,95
	Kuaro	1	596,76
	Long Ikis	1	1138,37
	Muara Komam	1	1753,4
	Long Kali	1	2250,44

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Balikpapan

1.5.1.6. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2025, Balai POM di Balikpapan mencatat total sebanyak 5.135 sarana dan 120.421 jumlah murid SD yang menjadi sasaran pengawasan yang sudah mencakup wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Industri farmasi	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	2
3	Industri obat tradisional (IOT)	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	2
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	0
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0
10	Industri kosmetik	5

11	Industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik	0
12	Industri pangan	22
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	2.632
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	19
15	Apotek	337
16	Toko obat	114
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	3
18	Rumah sakit	20
19	Puskesmas	57
20	Klinik	172
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0
22	Kantor Kesehatan Pelabuhan	1
23	Fasilitas distribusi obat tradisional	180
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	21
25	Fasilitas distribusi kosmetik	337
26	Klinik kecantikan	37
27	Sarana peredaran pangan olahan	648
28	Jumlah sekolah	526
29	Jumlah murid SD menurut kabupaten/kota	120.421
JUMLAH		125.556

Tabel 1.3 Sasaran Pengawasan Balai POM di Balikpapan Tahun 2025

Sebagai implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), pada tahun 2025 Balai POM di Balikpapan telah melakukan pemeriksaan terhadap 449 sarana. Sarana tersebut meliputi sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat) serta sarana distributor obat (PBF dan IFK) dengan persentase populasi apoteker penanggung jawab dan penanggung jawab toko obat perempuan sebesar 91%, sementara laki-laki sebesar 9%. Selain itu, pemeriksaan juga meliputi sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, distribusi pangan olahan dan produksi kosmetik serta pangan olahan dengan persentase populasi pemilik usaha/penanggung jawab perempuan sebesar 75% dan laki-laki sebesar 25%.

1.6. Isu Strategis

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan memiliki 3 wilayah pengawasan yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kota Balikpapan merupakan daerah yang sangat strategis sebagai salah satu pusat perekonomian di Kalimantan

Timur dan menjadi salah satu pintu gerbang menuju ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Penunjukkan Kalimantan Timur khususnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan. Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser sebagai wilayah daerah/kota penyangga IKN. Hal tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian dan perdagangan termasuk didalamnya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang meningkat. Potensi peningkatan dalam bidang sediaan farmasi dan pangan olahan ialah dengan pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan distribusi perdagangan dan konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk peningkatan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lebih bervariasi menjadi suatu tantangan Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Balikpapan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029. Identifikasi tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029. Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Balikpapan, dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

I. Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Balai POM di Balikpapan antara lain:

- a. Terdapat Pegawai yang mendapatkan tugas pada beberapa fungsi sekaligus

Terbatasnya jumlah sumber daya Manusia (SDM) di Balai POM di Balikpapan dan tingginya capaian target dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja, sehingga banyak pegawai yang mendapatkan tugas tambahan di luar tugas utama yang melekat pada fungsi dan jabatannya untuk mencapai target kinerja Balai POM di Balikpapan.

- b. Pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan tidak berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai.

Terbatasnya jumlah sumber daya Manusia (SDM) di lingkungan Balai POM di Balikpapan terutama di fungsi Tata Usaha dan Keuangan. Seiring dengan perubahan Balai POM di Balikpapan menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri maka diperlukan Petugas/SDM untuk menjabat Pengelola keuangan yang diambil dari Pegawai yang bekerja di bagian pengawasan.

- c. Jumlah SDM belum memadai dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai POM di Balikpapan saat ini belum memadai dalam mendukung pengawasan obat dan makanan secara optimal. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2025, Balai POM di Balikpapan masih membutuhkan tambahan pegawai. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan kebutuhan SDM yang ideal. Saat ini, persentase pemenuhan jumlah pegawai baru mencapai 48,57% dari total kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Untuk menutupi gap tersebut, Balai POM di Balikpapan masih memerlukan penambahan SDM sebanyak 18 pegawai.

- d. Kendaraan fungsional yang mendukung Pengawasan Obat dan Makanan belum tercukupi

Kendaraan fungsional dalam mendukung pengawasan obat dan makanan belum tercukupi, sementara ini kendaraan operasional dan fungsional yang dimiliki oleh Balai POM di Balikpapan hanya 3 kendaraan bermotor dengan rincian dua motor dan 1 mobil Lab keliling. Balai POM di Balikpapan masih membutuhkan kendaraan roda 4 /mobil yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan sediaan farmasi dan Pangan olahan karena belum tercovernya semua wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan memiliki transportasi umum yang layak agar pengawasan menjadi lebih optimal.

- e. Ruang Laboratorium belum memenuhi syarat untuk pengujian Level 1 dan 2 sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 200 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengembangan Laboratorium Balai POM di

Balikpapan saat ini hanya melakukan pengujian komoditas pangan, Obat dan kosmetik menggunakan metode uji cepat (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Untuk pengujian yang lebih kompleks masih dilakukan di laboratorium regionalisasi (Balai koordinator). Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Balai POM di Balikpapan direncanakan melakukan pengujian kompleks secara mandiri, seiring dengan berjalannya perencanaan pembangunan kantor dan laboratorium Balai POM di Balikpapan serta pengusulan Balai POM di Balikpapan menjadi Balai POM, diharapkan kapasitas pengujian semakin meningkat dan dapat melakukan pengujian mandiri untuk parameter yang lebih banyak.

II. Isu Eksternal

Adapun isu eksternal yang terjadi di Balai POM di Balikpapan antara lain:

a. Globalisasi Perdagangan.

Globalisasi perdagangan ini berdampak juga pada Industri sediaan farmasi dan Pangan olahan yang makin berkembang seiring dengan meningkatnya inovasi teknologi, berkembangnya alur distribusi dan penjualan, kemudahan Informasi. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang bervariasi sehingga masyarakat mempunyai banyak opsi dalam menentukan pola konsumsinya tetapi terdapat dampak negatif yang terjadi seperti semakin beragamnya modus operandi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk penggunaan teknologi (informasi, produksi dan lain lain) dan Akses perdagangan bebas menyebabkan beredarnya produk produk ilegal dan/atau substandard ke pasar dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya strategi pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan dari sisi permintaan juga diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan pasar yang aman dan bermutu.

b. Isu hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan yang mudah menyebar di masyarakat.

Kemajuan teknologi Informasi telah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, akan tetapi di era digital ini sering kali terdapat peningkatan hoaks informasi baik disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau kelompok yang salah satunya berkaitan dengan Sediaan farmasi dan Pangan olahan. Penyebaran hoaks ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga dapat memicu kepanikan dan kerugian ekonomi serta menurunnya kredibilitas BPOM di mata masyarakat. Salah satu wujud antisipasi isu hoaks sediaan farmasi dan pangan olahan yang menyebar di Masyarakat, Balai POM di Balikpapan membuat inovasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di platform media sosial berjudul “TGIF, Ternyata Guys Ini Fakta” yang dibuat secara rutin dan berkala berisi tentang fakta-fakta terkini dan update untuk menepis mitos dan hoax terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

- c. Permintaan masyarakat terhadap obat bahan alam (OBA) yang mengandung Bahan Kimia Obat dan kosmetik ilegal masih cukup tinggi.

Permintaan masyarakat terhadap Obat Bahan Alam (OBA) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan kosmetik ilegal masih cukup tinggi merupakan fenomena yang mengkhawatirkan. Meskipun sudah sering Badan POM melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk tersebut namun masih banyak ditemukan. Produk tersebut seringkali dipromosikan melalui media sosial dengan klaim khasiat yang berlebihan dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Balai POM di Balikpapan terus berupaya untuk mengkampanyekan bahaya OBA mengandung BKO dan kosmetik ilegal melalui media sosial berupa konten edukatif dan menarik pada berbagai platform sosial media, KIE secara langsung menyeluruh dan tepat sasaran, serta Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelaku usaha yang mengedarkan OBA mengandung BKO dan Kosmetik Ilegal melalui Operasi Pasar secara rutin dan berkala dan melibatkan lintas sektor terkait.

- d. Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Penunjukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Negara Indonesia membuat kota-kota di sekitar IKN berdampak dari segi sosial dan ekonomi, tak terkecuali Kota Balikpapan. Sebagai Kota Penyangga IKN Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan akan terdampak mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Peningkatan jumlah penduduk ini membawa sejumlah konsekuensi, terutama dalam hal kebutuhan dasar termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal ini kemungkinan membuka peluang pertumbuhan Industri Farmasi dan pangan olahan di Kota Balikpapan serta perkembangan UMKM yang meningkat. Oleh karena itu Balai POM di Balikpapan diharapkan untuk siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan penguatan Infrastruktur Balai POM di Balikpapan baik dari segi Sarana prasarana dan juga Sumber Daya Manusia. Balai POM di Balikpapan juga diharapkan untuk melakukan peningkatan Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan.

- e. Adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah alih status dari Kementerian Keuangan ke Badan POM sehingga tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tanah.

Balai POM di Balikpapan tetap menargetkan pembangunan Kantor dan Laboratorium di rentang waktu 2025-2029, hal tersebut untuk sebagai pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Balikpapan agar berjalan efektif efisien, selain itu juga sebagai pemenuhan aspirasi/ekspektasi masyarakat terkait peningkatan sarana prasarana Balai POM di Balikpapan. Terkait surat kepemilikan tanah Balai POM di Balikpapan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi yang baik dan progress alih kepemilikan tanah kepada Balai POM di Balikpapan serta pembangunan gedung kantor dan laboratorium dapat tetap berjalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Startegis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025- 2029 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025- 2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan

meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra Balai POM di Balikpapan 2025-2029 menjadi komitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Balikpapan sebagai UPT Badan POM akan memastikan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kerja memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkhasiat dan bermutu. Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai POM di Balikpapan bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2025-2029 yaitu:

VISI BPOM

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, perlu adanya pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 sebagai pondasi tersebut dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia

Mengacu pada visi Presiden yang tertuang pada RPJMN 2025-

2029 yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, maka BPOM mengusung Visi untuk rencana strategis 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan

dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI, Balai POM di Balikpapan tentunya berpedoman juga pada Visi tersebut di atas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

MISI BPOM

Untuk mendukung pencapaian Visi pada poin 2.1, maka disusunlah Misi strategis BPOM 2025-2029. Adapun Misi yang disusun harus selaras dengan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, dengan penjelasan seperti gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung secara langsung/tidak langsung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. Berdasarkan

hal tersebut, maka disusunlah Misi BPOM 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Untuk mendukung pencapaian Visi BPOM, Balai POM di Balikpapan juga menjalankan sepenuhnya Misi tersebut dalam melakukan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

TUJUAN BPOM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. RKT Tahun 2025 memuat 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	74,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,82
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2025 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel**. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen antara Kepala Balai POM di Balikpapan

sebagai pengemban mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2025. Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Balikpapan pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2025 – 2029.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2025 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 memuat 8 (Delapan) sasaran kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2025

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,5
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,35
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,5
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,30
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	77,2
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,35
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	100

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2025. Target pada RKT tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Balikpapan sebagai unit kerja Eselon IV wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Balikpapan) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance Simetris* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar

pemantauan tiap bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun (RAPK) 2025, sebagai berikut.

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	57,551,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	30,041,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,041,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	14,580,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	75	88.5	7,050,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	19,138,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,820,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	192,731,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	18,980,000
		11 - Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	1,700,000
		2.	03 - Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			9.8	9.8	9.8	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
3.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	131,442,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				75	75	75	100	100	100	100	100	2	93,870,000	
		03 - Jumlah desa pangan aman				50	75	75	100	100	100	100	100	1	161,258,000	
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	75	87.5	100	100	100	100	100	1	105,920,000	
4.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	0	5	15	20	25	40	50	60	70	75	80	87.3	40,034,000	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						15	55	85	94	94	94	94	137,269,000	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,851,000		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT											4.2	79,937,000		
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM											77.2	1,252,180,000		
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM											5	1,311,579,000		
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.35	6,520,000	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5	15	25	30	40	50	55	65	75	80	90	100	1,015,575,000	
													Total	4,956,412,000		

Tabel 2.5. Usulan Perubahan Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	SEBELUM										SESUDAH								JUSTIFIKASI PERUBAHAN
			Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep t	Okt	Nov	Des	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep t	Okt	Nov	Des	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,50	25	30	35	40	50	60	70	75	89,5	40	50	60	65	70	75	80	85	89,50	Penyesuaian jumlah sarana yang menjadi target pemeriksaan
2	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan	87,30	20	25	40	50	60	70	75	80	87,30	20	25	50	55	60	64	70	75	87,30	Penyesuaian dengan tahapan pendampingan terbaru sesuai dengan IKU
3	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	-	-	15	55	85	94	94	94	94	15	15	55	94	94	94	94	94	94	Akan terlaksana 1 perkara (Tahap II) di bulan Juli
4	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	100	30	40	50	55	65	75	80	90	100	35	40	50	60	65	75	85	90	100	Menyesuaikan dengan perencanaan kegiatan Reformasi Birokrasi masing-masing kelompok kerja

2.5 Metode Pengukuran

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam cara tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian yang semakin baik atau semakin rendah.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1 sebagai berikut :






$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2 sebagai berikut :

$$\% \text{Capaian} = \frac{(100\% - \text{realisasi})}{(100\% - \text{rencana})} \times 100\%$$




Disamping itu untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran diperlukan pengukuran kinerja kegiatan yang juga menjadi dasar evaluasi dan analisis karena berkaitan dengan indikator input, indikator output/outcome untuk menghitung efisiensi kegiatan dengan rincian pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibahas pada evaluasi dan analisis.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.5 Kategori Capaian IKU terhadap target Renstra

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% < x < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Merujuk pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM, maka dilakukan penunjukkan 1 (satu) orang pejabat fungsional sebagai penanggung jawab data dengan kriteria memahami indikator kinerja unit kerja maupun indikator kinerja BPOM yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas Penanggung Jawab Data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data kinerja dari masing-masing tim kerja di unit kerjanya.
- b. Melakukan verifikasi data sebelum dilaporkan.
- c. Melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan
- d. Mendokumentasikan data kinerja dengan baik agar data mampu telusur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2025, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS			
Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	Abu Gelap	Tidak Dapat Disimpulkan
Sangat Baik	$100% < x \leq 110%$	Biru	Sangat Efektif
Baik	$90% < x \leq 100%$	Hijau	Efektif
Cukup	$60% \leq x \leq 90%$	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	< 60%	Merah	Tidak Efektif

Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Balikpapan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 8 sasaran strategis

seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 8 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Balikpapan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	108,52	Sangat Baik
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102,35	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	96,55	Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	103,04	Sangat Baik
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	Belum dinilai
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100,00	Baik
NKO (Nilai Kinerja Organisasi)		101,24	Sangat Baik

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Balikpapan Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi	% Capaian Thd Target Bulan N	Kriteria Capaian thd Target bulan n
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.5	81.5	95.37	117.02	Tidak dapat disimpulkan
2		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	76.67	102.23	Sangat Baik
3		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0.00	Tidak ada KLB
4		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	80	106.67	Sangat Baik
5		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	60	78.57	130.95	Tidak dapat disimpulkan
6		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	0	0.00	Tidak ada Realisasi
7		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	100.00	Baik
8		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	85.77	92.47	Baik
9		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	83.33	98.04	Baik
10		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	79.35	95.86	120.81	Tidak dapat disimpulkan
11	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	10.2	10.44	102.35	Sangat Baik
12	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.5	86.5	86.94	100.51	Sangat Baik
13		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	100.00	Baik

14		Jumlah desa pangan aman	1	75	75	100.00	Baik
15		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	87.5	75	85.71	Baik
16	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3	50	50	100.00	Baik
17	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	55	56.67	103.04	Sangat Baik
18	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	Baik
19	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
20	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	50	50	100.00	Sangat Baik
21		Nilai AKIP UPT BPOM	77.2	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
22		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
23		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.35	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun

Dari 23 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 5 Indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”, 9 indikator kinerja capaiannya “Baik”, 0 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 0 indikator kinerja capaian “Kurang”, 3 indikator kinerja capaiannya “tidak dapat disimpulkan”, dan 6 indikator kinerja yang akan dinilai pada TW berikutnya.

Internal Process Perspective

SS1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan N	Realisasi	% Capaian Thd Target Bulan N	Kriteria Capaian thd Target bulan n
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.5	95.37	117.02	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	76.67	102.23	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	Tidak ada KLB
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	80	106.67	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60	78.57	130.95	Tidak dapat disimpulkan
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	0	0.00	Tidak ada Realisasi
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100.00	Baik
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	85.77	92.47	Baik
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	83.33	98.04	Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	95.86	120.81	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.1.1 Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

NPS sasaran strategis 1 triwulan II tahun 2025 sebesar 108,52% menggambarkan bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan berada dikriteria “**Sangat Baik**”

Berikut uraian terkait capaian kinerja setiap IKU sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2025.

3.1 SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kota Balikpapan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.

3.1.1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan Farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai pedoman sampling, dihitung berdasarkan kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan dan kesesuaian pelaporan monitoring.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	-----------	-----------	---------	----------

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.5	95,37	117,02	Tidak Dapat Disimpulkan
--	--	------	-------	--------	-------------------------

Pada TW II Tahun 2025, terdapat 20 sampel Sediaan Farmasi yang telah disampling dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil tersebut, didapat bahwa capaian TW II sebesar 117,02 dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	81.5	95,37	117,02	 Tercapai/Melampaui

Apabila realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 81,5%, maka didapat capaian kinerja sebesar 117,02% dan mendapat kategori “Tercapai/Melampaui”.

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, pelaksanaan sampling sediaan farmasi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada proses sampling. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala;

- Ketersediaan varian sampel di cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan yang masih terbatas.
- Penanganan sample saat pengiriman, risiko sampel rusak yang disebabkan penanganan jasa pengiriman yang kurang optimal.
- Kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian yang menjadi parameter sampel untuk diuji.

- Kemungkinan lainnya adalah hasil pegujian sampel yang tidak memenuhi syarat dikarenakan terdapat kendala dalam proses produksi maupun rantai distribusi sehingga mengakibatkan adanya penurunan mutu dan akhirnya menyebabkan produk tidak memenuhi syarat pengujian.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, pelaksanaan sampling sediaan farmasi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Pemilihan sampel diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis resiko sebagaimana yang diatur melalui pedoman sampling. Pelaporan hasil sampling telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tahapan dalam kegiatan sampling yang dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan, pelaksanaan pengujian hingga pelaporan hasil tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan komitmen UPT dalam melakukan pelaksanaan kegiatan sampling sediaan farmasi dan konsistensi pelaku usaha dalam memproduksi Sediaan Farmasi yang memenuhi syarat, dalam hal pelabelan maupun proses produksi/distribusi. Hal ini selaras dengan komitmen pelaku usaha untuk tetap menjaga prinsip-prinsip produksi Sediaan Farmasi yang benar.

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase Sediaan Farmasi yang memenuhi syarat antara lain:

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung ke sarana maupun dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan internal maupun lintas sektor terkait pembinaan pelaku usaha

3.1.2 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel Pangan Olahan adalah sampel makanan atau minuman yang dipilih berdasarkan evaluasi sesuai pedoman sampling yang kemudian diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindaklanjut. Persentase Pangan Olahan Berisiko yang memenuhi syarat dihitung

berdasarkan kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian tindaklanjut.


a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	76,67	102,23	Sangat Baik

Pada Triwulan II, terdapat 40 produk pangan olahan yang disampling berdasarkan analisis risiko dan pedoman sampling yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindaklanjut dan ketentuan lainnya. Berdasarkan data tersebut, didapat bahwa realisasi sebesar 76,67% dan capaian 102,23% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	76,67	102,23 	Tercapai/Melampaui

Apabila realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 75% maka didapat capaian kinerja sebesar 102,23% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Berdasarkan sajian di atas, diketahui bahwa capaian kinerja Persentase

Makanan yang memenuhi syarat pada TW II sebesar 102,2% dengan kategori Sangat Baik. Dari 40 sampel tersebut, tidak terdapat sampel dengan hasil Tidak Memenuhi Syarat. Meskipun tidak ditemukan pangan olahan yang TMS, namun masih ada kondisi yang dapat menyebabkan penurunan kinerja pada proses sampling kedepannya. Adapaun hal-hal yang dapat menjadi penyebab penurunan kinerja pada kegiatan sampling adalah:

- Masih adanya pelaku usaha sebagai produsen yang belum konsisten dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan kemasan yang sesuai ketentuan
- Pelaku usaha sarana distribusi yang belum *aware* terhadap penanganan pangan olahan selama rantai distribusi.
- Adanya pelaku usaha yang belum peduli terhadap izin edar pangan olahan yang didistribusikan untuk menjamin produk pangan olahan merupakan pangan yang aman dan bermutu.
- Pembinaan yang dilakukan UPT terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi belum berjalan dengan efektif. Baik pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan skala UMKM maupun skala industri.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan kegiatan sampling
- Pemanfaatan teknologi informasi oleh petugas untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan
- Meningkatnya koordinasi antara UPT BPOM dalam regional IV dalam hal pelaksanaan sampling dan jadwal pengujian di laboratorium

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat capaian antara lain:

- Terlambatnya reagen atau dukungan fungsi pengujian lainnya sehingga kegiatan sampling tidak dapat dilakukan sesuai rencana pelaksanaan

3.1.3 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah parameter sampel diuji sesuai investigasi, jumlah parameter yang diuji sesuai pedoman sampling dan jumlah parameter yang terkonfirmasi menjadi penyebab keracunan/ dengan total sampel.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Balikpapan	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	Tidak Ada Kejadian KLB

Pada TW II, tidak ada Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan, sehingga tidak dilakukan kegiatan sampling dan tidak ada sampel pangan keracunan yang diuji sesuai standar.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	Tidak Ada Kejadian KLB

Apabila realisasi TW II Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan target tahun 2025, maka didapat capaian sebesar 0% dengan kategori “Tidak Ada Realisasi”

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Pada TW II ini, tidak adanya capaian kinerja dalam pemenuhan target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejadian keracunan pangan olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan ataupun laporan pangan yang dicurigai sebagai pangan berbahaya sehingga tidak terdapat sampel pangan olahan yang diuji sebagai sampel KLB Pangan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- Memperkuat koordinasi dengan balai penguji dan lintas sektor terkait kejadian KLB Pangan
- Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan kegiatan pengujian

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat capaian antara lain:

- Terlambatnya reagen atau dukungan fungsi pengujian lainnya sehingga sampel tidak dapat dilakukan pengujian.

3.1.4 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel PIRT berisiko adalah sampel pangan olahan hasil produksi rumah tangga yang dipilih berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan penjumlahan kesesuaian target, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan, ketepatan waktu pengambilan kesimpulan sampai tindak lanjut sampel PIRT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kategori
------------------	-------------------	-----------	-----------	---------	----------

Terwujudnya					<i>Sangat Baik</i>
Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	80	106,67	

Pada TW II, dari 4 sampel PIRT Pangan Olahan yang disampling dan diuji, dari semua sampel yang diuji tidak ditemukan sampel dengan hasil akhir Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan data tersebut, didapat realisasi sebesar 80% dan capaian 106,67% dengan kriteria “Sangat Baik”

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	75	80	106,67	 Tercapai Melampaui

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan target tahun 2025, maka didapat capaian sebesar 106,67% dengan kategori “Tercapai Melampaui”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan data yang tersaji di atas, pada TW II tidak ditemukan sampel Pangan Olahan yang TMS. Namun pada Triwulan selanjutnya banyak kemungkinan ditemukan Kembali sampel pangan olahan PIRT yang TMS di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini antara lain:

- Kurangnya monitoring terhadap perizinan usaha dari industri rumah tangga dari dinas setempat.
- Kurangnya perhatian pelaku usaha terhadap izin usaha produsen sebagai

distributor saat mendistribusikan produk.

- Pelaku usaha yang belum konsisten dalam penarapan higine dan sanitasi dalam proses produksi.
- Rendahnya komitmen pelaku usaha dalam menjamin kualitas dari produk pangan yang diproduksi.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha sebagai produsen terkait batas waktu izin usaha
- Melakukan kerjasama yang intensif dengan lintas sektor terkait agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap pangan olahan PIRT yang beredar
- Meningkatkan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan
- Mendorong kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas pangan olahan yang diproduksi

3.1.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dihitung berdasarkan *feedback* atau respon dari pelaku usaha dan lintas sektor terhadap rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi yang diberikan oleh UPT kepada pelaku usaha dan lintas sektor tersebut.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	78.57	130,95	Tidak dapat disimpulkan

kerja Loka POM di
Kota Balikpapan

Tabel 3.2.5 Tabel Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Pada triwulan II, terdapat 15 respon pelaku usaha terhadap 31 surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh UPT sedangkan terdapat 5 surat rekomendasi/tindak lanjut yang dikirimkan kepada lintas sektor. Dari semua surat tindak lanjut yang dikirimkan ke lintas sektor kedua surat tersebut telah mendapat *feedback* dari lintas sektor sehingga capaian menjadi 100 %. Berdasarkan data tersebut, didapat bahwa realisasi sebesar 78,57 % dan capaian 130,95 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,5	78,57	87,79 	Akan Tercapai

Tabel 3.2.6 Tabel Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Apabila realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 89,5% maka didapat capaian kinerja sebesar 87,79% dengan kategori “Akan Tercapai”.

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Dari definisi operasional diketahui bahwa realisasi didapat dari menjumlahkan persentase respon dari pelaku usaha dan lintas sektor lalu dibagi dua. Namun karena terdapat beberapa surat yang belum mendapatkan respon dari pelaku usaha, maka capaian belum mencapai target tahunan.

Selain itu beberapa penyebab lain kegagalan atau penurunan kinerja indikator tersebut antara lain:

- Pelaku usaha membutuhkan waktu lebih daripada timeline yang ditetapkan untuk membuat tindakan CAPA
- Rendahnya urgensi pelaku usaha untuk memperbaiki temuan dan melaporkannya pada Balai POM di Balikpapan sebagai respon dari surat tindak lanjut

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya persentase obat yang memenuhi syarat antara lain:

- Melakukan pendekatan secara persuasif serta bimbingan/sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sektor.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi ke lintas sektor atau instansi terkait dalam pengawasan sarana

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat capaian antara lain:

- Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan serta pengerjaan surat tindak lanjut oleh petugas pemeriksaan.

3.1.6 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata capaian sarana produksi Obat, OBA (Obat Bahan Alam) dan SK (Suplemen Kesehatan) serta Kosmetik. Persentase realisasi sarana produksi Obat dihitung berdasarkan:

1. Kesesuaian sarana dan cakupan pengawasan
2. Jumlah pelaksanaan inspeksi
3. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

Persentase realisasi sarana produksi OBA dan SK dihitung berdasarkan:

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Sementara realisasi sarana produksi Kosmetik dihitung berdasarkan:

1. Pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	Tidak ada realisasi

Pada TW II tahun 2025 belum terdapat realisasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi, sehingga didapat capaian 0% terkait IKK ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	0	0	Perlu upaya keras

Apabila realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 85%, maka didapat capaian kinerja sebesar 0%

c. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Balai POM di Balikpapan memiliki wilayah pengawasan antara lain Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Pada ketiga kota/kabupaten ini, belum terdapat sarana produksi Obat dan SK sehingga tidak ada target sarana pada komoditi tersebut. Terdapat satu sarana OBA yang baru tersertifikasi pada akhir tahun 2024 sehingga belum masuk dalam target pengawasan 2025. Sementara terkait komoditi Kosmetik, terdapat 3 (tiga) sarana produksi di wilayah lingkup pengawasan Balai POM di Balikpapan, namun 2 diantaranya diusulkan untuk dicabut sertifikat CPKB nya sejak 2024 sehingga tersisa satu yang menjadi target pengawasan tahun 2025. Adapun sarana ini direncanakan untuk diperiksa di TW IV sehingga pada TW II ini belum ada realisasi pelaksanaan inspeksi.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

- Melakukan *follow up* terkait keberlangsungan usaha produksi sediaan farmasi yang *existing*
- Meningkatkan intensitas pendampingan pelaku usaha produksi sediaan

farmasi

- Meningkatkan koordinasi dengan internal maupun lintas sektor terkait pembinaan pelaku usaha

3.1.7 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Berdasarkan manual IKU per 20 Januari 2025, Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$


Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Sedangkan Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

- a. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan pada SIPT (tanggal 15 bulan berikutnya)
- b. Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut
- c. Kesesuaian grading sarana yang diperiksa

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025


Tabel Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa	80	80	100	Baik

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	
-----------------------------------	--------------------------------------	---

Pada Triwulan II, didapat realisasi sebesar 80% dengan target 80% sehingga dihasilkan capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80	80	100 	Tercapai/Melampaui

Apabila realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 80% maka didapat capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Balai POM di Balikpapan memiliki target pengawasan 18 sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP. Pelaksanaan pengawasan pada TW II tahun 2025 dilakukan sesuai perencanaan, namun ditemui beberapa kendala seperti:

- Pada bulan April terdapat kesalahan grading pada salah satu sarana yang diperiksa
- Pada bulan Mei, pelaksanaan pengawasan tidak sesuai perencanaan karena terdapat kegiatan insidental yang lebih prioritas sehingga tidak tersedia SDM untuk melakukan pengawasan
- Pada bulan Juni terdapat keterlambatan pelaporan pada SIPT pada

beberapa sarana sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai realisasi. Walaupun terdapat beberapa kendala seperti yang telah disebutkan di atas, namun realisasi yang dihasilkan pada TW II tetap sesuai dengan target yaitu 80%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang maupun meningkatkan tercapainya Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan antara lain:

- Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan inspeksi/pemeriksaan ke sarana
- Melakukan refreshment kepada petugas terkait pedoman pemeriksaan serta pemberian grading sarana
- Monitoring pelaporan hasil inspeksi dan follow up kepada petugas terkait
- Monitoring pelaksanaan inspeksi agar sesuai dengan perencanaan dan koordinasi dengan katim lain terkait pembagian SDM untuk pemeriksaan rutin

3.1.8 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang memenuhi ketentuan dihitung berdasarkan Persentase dari Jumlah total fasilitas distribusi Sediaan Farmasi memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total sarana distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan. Sarana distribusi Sediaan Farmasi yang menjadi target di Balai POM di Balikpapan meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan Fasilitas Distribusi Kosmetik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	85,77	92,47	Baik

Tabel 3.2.14 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada TW II, terdapat 42 sarana yang telah diperiksa namun dalam penginputan data di SIPT belum dilakukan 100% sehingga didapat realisasi sebesar 85,77%. Apabila dibandingkan dengan target TW II yaitu sebesar 92,75%, maka didapat capaian sebesar 92,47% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,75	85,77	92,47	Akan Tercapai

Tabel 3.2.15 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025, maka didapat capaian sebesar 92,47% dengan kategori “Akan Tercapai”

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Beberapa hal yang menyebabkan ketercapaian kinerja antara lain:

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk-produk yang boleh diedarkan pada wilayah Indonesia

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan produk sediaan farmasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya kerjasama yang baik antara UPT dengan pelaku usaha maupun lintas sektor dalam hal memastikan produk dan kegiatan peredaran dapat dilakukan dengan baik

Adapun hal dapat menjadi tantangan dan peluang dalam hal mencapai indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya cakupan luas wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan sehingga perlu adanya pendekatan kembali kepada pelaku usaha dan lintas sektor di wilayah pengawasan terkait.
- Jumlah sumber daya manusia terutama di fungsi pemeriksaan yang terbatas tidak mencukupi pada beban kerja yang ada.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan paparan pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha harus terus menerus dilakukan. Baik itu pembinaan terkait cara distribusi yang baik maupun edukasi terhadap produk-produk yang boleh diedarkan di wilayah negara Indonesia. Kesadaran pelaku usaha untuk terus konsisten melakukan cara distribusi yang baik maupun memilih produk untuk dijual harus selalu ditingkatkan. Pelaku usaha sebaiknya tetap beri sosialisasi dan pengertian bahwa mereka juga turut andil dalam sistem pengawasan peredaran Sediaan Farmasi.

Selain itu perlu dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja seperti:

- Sosialisasi SOP dan *refreshment* pedoman terkait pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi kepada masing-masing petugas.
- Melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha maupun lintas sektor baik dilakukan secara langsung saat pemeriksaan atau dilakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan peredaran sediaan farmasi di Indonesia.

3.1.9 Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan dihitung berdasarkan Persentase dari Jumlah total fasilitas distribusi Pangan Olahan memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan pendistribusian pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total sarana distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan. Sarana distribusi Pangan Olahan yang menjadi target di Balai POM di Balikpapan meliputi distributor pangan, toko grosir pangan, ritail modern (supermarket dan minimarket) dan toko kelontong.


a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	83,33	98,04	Baik

Tabel 3.2.14 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada TW II, dilakukan pemeriksaan sarana pangan olahan pada wilayah pengawasan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi target sesuai rencana pelaksanaan. Pemeriksaan sarana pangan olahan pada TW II difokuskan pada sarana yang belum diperiksa sejak tahun 2024. Sehingga apabila dibandingkan dengan target TW II yaitu sebesar 85%, maka didapat capaian sebesar 83,33 % dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	83,33	98,04	 Akan Tercapai

Tabel 3.2.15 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025, maka tidak terdapat capaian dengan kategori “Akan Tercapai”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Beberapa hal yang menyebabkan ketercapaian kinerja antara lain:

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk-produk yang boleh diedarkan pada wilayah Indonesia
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan produk pangan olahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya kerjasama yang baik antara UPT dengan pelaku usaha maupun lintas sektor dalam hal memastikan produk dan kegiatan peredaran dapat dilakukan dengan baik

Adapun hal dapat menjadi tantangan dan peluang dalam hal mencapai indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya jumlah sarana distribusi pangan olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan sehingga perlu adanya pendekatan kembali kepada pelaku usaha dan lintas sektor di wilayah pengawasan terkait.
- Jumlah sumber daya manusia terutama di fungsi pemeriksaan yang terbatas tidak mencukupi pada beban kerja yang ada.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan paparan pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

pembinaan kepada pelaku usaha harus terus menerus dilakukan. Baik itu pembinaan terkait cara distribusi yang baik maupun edukasi terhadap produk-produk yang boleh diedarkan di wilayah negara Indonesia. Kesadaran pelaku usaha untuk terus konsisten melakukan cara distribusi yang baik maupun memilih produk untuk dijual harus selalu ditingkatkan. Pelaku usaha sebaiknya tetap beri sosialisasi dan pengertian bahwa mereka juga turut andil dalam sistem pengawasan peredaran Pangan Olahan.

Selain itu perlu dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja seperti:

- Sosialisasi SOP dan *refreshment* pedoman terkait pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan kepada masing-masing personil Fungsi Pemeriksaan.
- Melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha maupun lintas sektor baik dilakukan secara langsung saat pemeriksaan atau dilakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan peredaran Pangan Olahan di Indonesia

3.1.10 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi tiap komoditi. Persentase iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan

Persentase iklan OBA yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan (30 HK setelah pengawasan)
- c. Akurasi pengambilan keputusan

Persentase iklan SK yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan (30 HK setelah pengawasan)
- c. Akurasi pengambilan keputusan

Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- c. Ketepatan waktu pelaporan (tanggal 10 bulan berikutnya)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025


Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,35	95,86	120,81	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan periode TW II didapat realisasi sebesar 100% dengan capaian 120,81% yang dinormalisasi menjadi 110% dan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
-------------------	----------------	-----------------	---------	----------

Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,35	95,86	120,81		Tercapai/ Melampaui
---	-------	-------	--------	---	------------------------

Apabila realisasi TW II Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025, maka didapat capaian sebesar 120,81% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Balikpapan dilakukan pada berbagai media seperti media cetak, *online*, elektronik, maupun luar ruang. Berdasarkan monitoring pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, diketahui bahwa semua petugas pengawas melakukan pengawasan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Hal ini juga didukung oleh kegiatan seperti:

- Monitoring pelaksanaan secara intensif kepada petugas pengawasan
- Peningkatan kompetensi petugas pengawasan melalui pelatihan mandiri pada aplikasi ideas BPOM

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan antara lain:

- Refreshment teknis pengawasan ke petugas
- Follow up berkala ke petugas terkait pelaporan pengawasan iklan
- Koordinasi ke pusat perihal pengawasan iklan

3.2 SASARAN KEGIATAN 2

Pada triwulan II tahun 2025, target nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 10,2. Sedangkan untuk target tahunan sebesar 11. Realisasi triwulan II nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 10,44. Persentase nilai capaian indikator terhadap target bulanan/triwulan sebesar 102,35%, sedangkan persentase nilai capaian indikator terhadap target tahunan sebesar 94,91 dengan kriteria “Sangat Baik”. Pencapaian sasaran kegiatan ini menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

3.2.1 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Balikpapan	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10,2	10,44	102,35	Sangat Baik

Pelaksanaan pengukuran nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Standar Kemampuan Laboratorium dibagi menjadi tiga komponen yaitu,

1. Standar Ruang Lingkup (75%)
2. Standar Peralatan (15%)
3. Standar Kompetensi Laboratorium (10%)

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan 3 komponen tersebut, Realisasi Triwulan II tahun 2025 nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 10,44 dan target triwulan II adalah 10,2 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi triwulan II tercapai/melampaui rencana target triwulan II tahun 2025. Untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 102,35% dan dikategorikan “Sangat Baik”.

Untuk mempertahankan capaian, Balai POM di Balikpapan akan melaksanakan tiga komponen Standar Kemampuan Laboratorium sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian ini dapat dipertahankan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	10,44	94,91 	Tercapai/ Melampaui

Apabila realisasi nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang

dilaksanakan dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 11 maka didapat capaian kinerja sebesar 94,91% dan mendapat kategori “Tercapai/Melampaui”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang dilaksanakan berada di kategori Sangat Baik. Capaian tersebut disebabkan oleh terpenuhinya standar kompetensi laboratorium, standar ruang lingkup dan standar peralatan. Pada standar kompetensi laboratorium di triwulan II aspek 1 dan aspek 2 untuk laboratorium pangan masing-masing terpenuhi sehingga menyumbang nilai 20%. Untuk standar ruang lingkup didapatkan nilai 6,25% dikarenakan pada standar ruang lingkup komoditi pangan Balai POM di Balikpapan memenuhi 4 baseline yaitu pengujian Rhodamin B, Methanyl Yellow, Formalin dan Boraks. Selain itu juga dilakukan pengujian obat dan NAPPZA dengan *rapid test*. Sedangkan untuk standar peralatan Balai POM di Balikpapan masih hanya memenuhi standar alat kimia yaitu sebesar 25%. Untuk standar alat mikrobiologi Balai POM di Balikpapan masih belum memenuhi standar.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Komponen standar kompetensi laboratorium di triwulan II aspek 1 dan aspek 2 untuk laboratorium pangan masing-masing terpenuhi dan mendapatkan nilai sebesar 10 sehingga secara keseluruhan standar kompetensi laboratorium menyumbang nilai 20%. Penentuan aspek 1 dan 2 terpenuhi atau tidak adalah jumlah pengujian yang dapat menguji parameter tersebut. Jika lebih dari 1 pengujian maka aspek 2 mendapatkan nilai 10. Jika hanya 1 pengujian maka hanya aspek 1 yang mendapatkan nilai 10.

Komponen kedua yaitu standar ruang lingkup didapatkan nilai 6,25% dikarenakan pada standar ruang lingkup komoditi pangan Balai POM di Balikpapan memenuhi 4 baseline yaitu pengujian Rhodamin B, Methanyl

Yellow, Formalin dan Boraks. Pada triwulan II pengujian juga dilakukan pada komoditi obat NAPPZA menggunakan *rapid test kit*. Komponen ketiga untuk standar peralatan Balai POM di Balikpapan masih hanya memenuhi standar alat kimia. Namun belum semua standar peralatan kimia sudah terpenuhi, yaitu hanya sebesar 50% dari baseline yang sudah terpenuhi. Sedangkan untuk standar alat mikrobiologi Balai POM di Balikpapan masih belum memenuhi standar. Kedua hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja modal Balai POM di Balikpapan.

Internal Process Perspective

SS3 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan**

3.3 SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan memiliki 4 indikator yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pada triwulan II tahun 2025, semua target indikator pada sasaran kegiatan 3 sudah tercapai. Untuk capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT memenuhi kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan untuk capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas memenuhi kriteria “Baik”. Perincian capaian sasaran kegiatan ini untuk masing-masing indikator kinerja ialah sebagai berikut :

3.3.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	-----------	-----------	---------	----------

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	86,5	86,94	100,51	Sangat Baik
--	---	------	-------	--------	-------------

Realisasi Triwulan II tahun 2025 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup UPT adalah 86,94 dan target triwulan II adalah 86,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi Triwulan II sudah melampaui rencana target triwulan II tahun 2025. Sedangkan untuk presentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100,51% dan dikategorikan “Sangat Baik”.


Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap minimal 30 orang responden setiap triwulan yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media dari bulan April sampai dengan bulan Juni (Triwulan II). Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas KIE berupa tatap muka dan KIE berupa informasi melalui media tentang obat dan makanan yang disampaikan kepada masyarakat. Pengukuran indeks efektifitas KIE media maupun tatap muka terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, nilai efektifitas KIE Balai POM di Balikpapan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 86,94 dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 86,5% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100,51% dengan kategori “Sangat Baik”. Nilai efektifitas tersebut

dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan efektif.

Untuk mempertahankan capaian, Balai POM di Balikpapan akan menyediakan sarana KIE yang beragam sehingga dapat dipahami oleh semua kategori masyarakat. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian ini dapat ditingkatkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,5	86,94	100,51 	Tercapai/ Melampaui

Apabila realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 86,5 maka didapat capaian kinerja sebesar 100,51% dan mendapat kategori “Tercapai/Melampaui”.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan berada di kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah melampaui target.

Apabila dilihat secara rinci, capaian Indeks efektivitas KIE merupakan hasil rata-rata dari Indeks efektivitas KIE melalui media dan Indeks efektivitas KIE secara tatap muka. Indeks efektivitas KIE melalui media pada TW II sudah tercapai sesuai target. Namun masih terdapat capaian terendah yang masih kurang dari target yaitu pada aspek pemahaman audiens. Rendahnya pemahaman KIE dengan Media dapat disebabkan bahasa dan istilah teknis dalam materi KIE yang mungkin belum sepenuhnya sederhana atau familiar bagi semua segmen masyarakat. Selain itu dapat dipengaruhi oleh format penyajian yang kurang memperhatikan keragaman tingkat literasi atau kebutuhan kelompok rentan (misalnya masyarakat pedesaan, lanjut usia,

atau difabel). Tingkat pemahaman audiens dalam menangkap pesan pada materi KIE berbeda-beda. Faktor usia, latar belakang pendidikan, ketertarikan pada materi, kondisi fisik/psikologis saat menerima pesan dapat mempengaruhi kemampuan mengingat dan memahami. Sedangkan untuk Indeks efektivitas KIE tatap muka juga masih terdapat nilai yang masih kurang dari target (terendah) yaitu aspek pemahaman audien. Hal ini berarti bahwa masih ada sebagian peserta yang belum sepenuhnya memahami materi yang disampaikan pada saat KIE. Berbagai usia dan latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap informasi yang diberikan oleh petugas. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat dikombinasikan dengan pemberian edukasi melalui ragam saluran media agar materi KIE dapat diterima masyarakat secara berkesinambungan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indeks efektivitas KIE pada triwulan II sudah melampaui target dengan capaian 100,51%. Terdapat beberapa program di triwulan II yang menunjang keberhasilan pencapaian target. Untuk KIE melalui media dilakukan dengan menggunakan media sosial Balai POM di Balikpapan seperti Instagram, X, Tiktok, Youtube dan Facebook. Konten yang diunggah disesuaikan dengan Agenda Setting yang ditetapkan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM RI setiap bulan. Balai POM di Balikpapan juga mengunggah konten tentang isu hangat obat dan makanan saat ini dan konten tentang klarifikasi hoax atau info palsu yang beredar di masyarakat. Selain itu Unit Layanan Pengaduan Konsumen baik melalui WhatsApp, Mall Pelayanan Publik maupun kunjungan kegiatan secara langsung juga masih aktif selama bulan April-Juni.

Untuk KIE secara tatap muka terdapat kegiatan Jamu: Kearifan Lokal untuk Kesehatan Bangsa tanggal 21 Mei 2025. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai jamu, mulai dari sejarah dan filosofinya, ragam jenisnya hingga cara memilih dan mengonsumsi jamu yang aman dan benar. Berdasarkan hasil pretest dan post test semua peserta mendapatkan nilai post test yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan adanya

peningkatan pengetahuan peserta KIE. Sedangkan untuk hasil evaluasi kegiatan secara keseluruhan, peserta menilai kegiatan ini Sangat Baik (84-89).

3.3.2 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	75	75	100%	Baik

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi Triwulan II tahun 2025 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 75 dan target triwulan II adalah 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi Triwulan II sudah mencapai rencana target triwulan II tahun 2025. Sedangkan untuk presentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.


Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu :

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
----	---------------------	-------

1.	Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah)	25%
2.	Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25%
3.	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%
4.	Monitoring dan Sertifikasi	25%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 75% dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 75% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”. Pada triwulan IV nanti akan dilakukan tahapan Monitoring dan Sertifikasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	75	75	 Akan Tercapai

Target tahunan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan

Keamanan Pangan sebanyak 2 sekolah. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana 3 kegiatan dari 4 kegiatan. Apabila realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target tahunannya maka didapat capaian kinerja sebesar 75% dan mendapat kategori “Akan Tercapai”. Pada triwulan III nanti akan dilaksanakan tahapan terakhir yaitu Monitoring dan Sertifikasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Balai POM di Balikpapan dengan peserta kegiatan dari berbagai sekolah yang kooperatif. Selain itu karena ketiga tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai *timeline* dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah. Pada kegiatan Advokasi dilakukan secara sinergi antara 3 IKU lain yaitu Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan peserta sebanyak 61 orang. Pihak lintas sektor SAPA Sekolah yang hadir yaitu dari Wakil Walikota Balikpapan, perwakilan sekolah SMPN 2 Kota Balikpapan, SDN 009 Balikpapan Utara,

Bappeda Litbang Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Bagian Kesra Pemerintah Kota Balikpapan, DP3AKB dan Kementerian Agama Balikpapan. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan berita Acara Komitmen antar lintas sektor dengan BPOM untuk bersama-sama menyelenggarakan Program Prioritas Nasional. Semua lintas sektor yang hadir pada kegiatan ini sangat mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Tahapan berikutnya yaitu kegiatan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan diikuti oleh 7 sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA. Berdasarkan hasil pretest dan post test, 80% peserta mendapatkan nilai post test yang lebih tinggi. Selain itu hasil evaluasi kegiatan juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan peserta menilai kegiatan ini Sangat Baik (86,36-100).

Tahapan ketiga yaitu Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah yang diikuti oleh SDN 009 Balikpapan Utara sebagai target utama *full* intervensi. Berdasarkan hasil pretest dan post test, 80% peserta mendapatkan nilai post test yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa peserta mendapatkan pengetahuan dari materi yang disampaikan. Selain itu hasil evaluasi kegiatan dinilai Sangat Baik (86,67-100).

3.3.3 Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Jumlah Desa Pangan Aman	75	75	100%	Baik


Indikator Jumlah Desa Pangan Aman merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi triwulan II tahun 2025 Jumlah Desa Pangan Aman adalah 75 dan target triwulan II adalah 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi sudah mencapai rencana target. Sedangkan untuk presentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Desa Pangan Aman menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu :

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	25%
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%
3.	Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa	25%
4.	Monitoring dan Evaluasi	25%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dan Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 75% dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 75% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”. Pada triwulan IV nanti akan dilakukan tahapan Monitoring dan Evaluasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	75	75	 Akan Tercapai

Target tahunan Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 desa/kelurahan. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana 3 kegiatan dari 4 kegiatan. Apabila realisasi Jumlah Desa Pangan Aman yang dilaksanakan dibandingkan dengan target tahunannya maka didapat capaian kinerja sebesar 75% dan mendapat kategori “Akan Tercapai”. Pada triwulan III nanti akan dilaksanakan tahapan terakhir yaitu Monitoring dan Evaluasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Desa Pangan Aman berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) dan Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Balai POM di Balikpapan dengan pihak kelurahan yang kooperatif dan berkomitmen untuk menjadi desa/kelurahan pangan aman. Selain itu karena ketiga tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai *timeline* dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada kegiatan Advokasi dilakukan secara sinergi antara 3 IKU lain yaitu Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan peserta sebanyak 61 orang. Pihak lintas sektor Desa Pangan Aman yang hadir yaitu dari

Wakil Walikota Balikpapan, bagian Kesra Pemkot Balikpapan, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, DP3AKB, Kelurahan Sumber Rejo dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan berita Acara Komitmen antar lintas sektor dengan BPOM untuk bersama-sama menyelenggarakan Program Prioritas Nasional. Semua lintas sektor yang hadir pada kegiatan ini sangat mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan Desa Pangan Aman.

Tahapan berikutnya yaitu kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) diikuti oleh kelurahan Gunung Sari Ilir. Berdasarkan hasil pretest dan post test, semua peserta mendapatkan nilai post test yang lebih tinggi. Selain itu hasil evaluasi kegiatan juga menunjukkan bahwa secara keseluruhan peserta menilai kegiatan ini Sangat Baik (89,17-94,67).

Tahapan ketiga yaitu Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa yang diikuti oleh berbagai komunitas di Kelurahan Gunung Sari Ilir. Berdasarkan hasil pretest dan post test, semua peserta mendapatkan nilai post test yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa peserta mendapatkan pengetahuan dari materi yang disampaikan. Selain itu hasil evaluasi kegiatan dinilai Sangat Baik (88,24-95,59).

3.3.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	75	75	100%	Baik


Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi triwulan II tahun 2025 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 75 dan target triwulan II adalah 75 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi sudah mencapai rencana target. Sedangkan untuk presentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu :

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
1.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	25%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan II tahun 2025 sebesar 75% dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 75% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	75	75	 Akan Tercapai

Target tahunan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 pasar. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana 3 kegiatan dari 4 kegiatan. Apabila realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan dibandingkan dengan target tahunannya maka didapat capaian kinerja sebesar 75% dan mendapat kategori “Akan Tercapai”. Pada triwulan III nanti akan dilaksanakan tahapan terakhir yaitu Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dan Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Balai POM di Balikpapan dengan pihak pasar yang kooperatif. Selain itu karena ketiga tahapan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai *timeline* dari unit pengampu IKU dan pelaporan juga dilakukan secara tepat waktu.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada kegiatan Advokasi dilakukan secara sinergi antara 3 IKU lain yaitu Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan peserta sebanyak 61 orang. Pihak lintas sektor Pasar Pangan Aman yang hadir yaitu dari

Wakil Walikota Balikpapan, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan dan UPTD Pasar Wilayah IV Kota Balikpapan. Pada kegiatan ini dilakukan penandatanganan berita Acara Komitmen antar lintas sektor dengan BPOM untuk bersama-sama menyelenggarakan Program Prioritas Nasional. Semua lintas sektor yang hadir pada kegiatan ini sangat mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Tahapan berikutnya yaitu kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar diikuti oleh Pasar Sepinggang Balikpapan. Berdasarkan hasil pretest dan post test, nilai rata-rata peserta yang menjawab benar pada saat pretest yaitu 83,81% yang menunjukkan bahwa Sebagian besar peserta sudah memahami budaya keamanan pangan. Sedangkan untuk nilai rata-rata post test peserta menjawab dengan benar yaitu 90,95% yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan.

Tahapan ketiga yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar yang diikuti oleh komunitas pasar di Pasar Sepinggang Balikpapan. Kegiatan berupa sosialisasi yang dilakukan kader keamanan pangan, melakukan unggah konten keamanan pangan di media sosial serta menyebarkan informasi ke grup *WhatsApp* komunitas Pasar Sepinggang secara berkala.

Internal Process Perspective

SS4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

3.4 SASARAN KEGIATAN 4

Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Balai POM di Balikpapan telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Balikpapan dengan nilai capaian indikator 100% dengan kriteria “**Baik**”.

Pencapaian sasaran kegiatan ini menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

3.4.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi dan Target I K U Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	50	100	Baik

Realisasi Triwulan II tahun 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 100% dengan kriteria Baik. Capaian terhadap indikator kinerja hasil masuk dalam kategori tercapai.

Indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan berdasarkan tahapan pendampingan terhadap UMKM. Target ditetapkan berdasarkan acuan waktu yang ada pada pedoman dan perkiraan pelaksanaan kegiatan. Kriteria UMKM yang didampingi, antara lain :

- Untuk UMK Pangan Olahan :
UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.
- Untuk UMKM OBA :
 - 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;

- 2) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
 - 7) Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
 - ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
 - ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
 - 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
 - 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
 - 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
 - ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan

fasilitas produksi; dan

- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Adapun tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan sebagai berikut

:

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan	Jan-Maret	5
2	Penetapan UMK Pangan Olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret-April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April-Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov-Des	5

2. Obat Tradisional


No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Obat Tradisional	1 s.d. 28 Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat Tradisional	1 Maret s.d 30 April	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	1 Maret s.d 30 Oktober	40	
4	Sertifikasi	1 September – 30 November	20	
5	Monitoring, Evaluasi	TW I : 30 Maret – 10	10	UPT, setiap TW

	dan Pelaporan	Apri TW. II : 30 Juni – 10 Juli TW III : 30 Agustus – 10 September TW IV : 30 Desember – 10 Januari		membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, Progres fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
--	---------------	--	--	---

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon udaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 - 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OTSKK
2	Bimtek setiap tahapan (denah CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir. Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87,3	50	57,27	 Perlu Upaya

Realisasi *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan* pada tahun 2025 di Balai POM di Balikpapan masih perlu upaya keras dikarenakan realisasi capaian berdasarkan tahapan pendampingan yang dilakukan setiap triwulan. Hingga triwulan II realisasi mencapai 50% dan akan ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2025.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi kinerja indikator "*Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*" pada triwulan II tahun 2025 sebesar 50% dengan capaian realisasi 100% kriteria penilaian baik.

Pelaksanaan kegiatan tahapan yang telah ditargetkan pada triwulan II yaitu Bimbingan Teknis CPPOB, Bimbingan Teknis CPKB dan Bimbingan Teknis CPOTB sehingga capaian realisasi 100% dari realisasi 50% sampai dengan bulan juni.

Kegiatan lain yang dilaksanakan pada triwulan II berupa fasilitasi pendampingan dengan adanya desk atau coaching kepada pelaku usaha sehingga beberapa pelaku usaha yang ditargetkan pada tahun 2025 sudah mencapai target dengan terbitnya Izin Penerapan CPPOB dan Surat Pemenuhan Aspek CPKB. Untuk CPOTB masih dalam proses pendampingan CAPA. Kegiatan lain yang menambah banyaknya pelaku usaha ditahun ini adanya kegiatan SAPA KAMPUS yang menjadi perpanjangan tangan fasilitator sehingga beberapa pelaku usaha dapat didampingi secara intensif dan menyeluruh serta membantu dalam pembuatan dokumen perusahaan. Kegiatan pendampingan akan terus berlanjut sesuai dengan tahapan pendampingan seperti adanya sosialisasi dan desk registrasi pangan olahan, pemeriksaan sarana serta kegiatan lainnya untuk pendampingan progres pengajuan UMKM.

Semua kegiatan didukung oleh terpenuhinya peningkatan kompetensi petugas sehingga dapat memberikan pendampingan yang berkualitas bagi UMKM yang mendapatkan izin penerapan CPPOB, CPOTB maupun CPKB dan surat

rekomendasi pemohon notifikasi serta pada proses pengajuan izin edar. Selain itu, dengan tersedianya pendampingan secara online memudahkan petugas untuk mendampingi UMKM dengan cepat. Namun terkadang banyaknya pelaku usaha dan terbatasnya fasilitator di Balai POM di Balikpapan serta prasarana *zoom meeting* yang tidak dapat dilakukan untuk beberapa pelaku usaha dalam satu waktu karena tidak ada fitur untuk perkelas-kelas sehingga satu waktu hanya dapat dilakukan pendampingan pada satu pelaku usaha sehingga butuh penjadwalan pendampingan online yang lebih banyak.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di triwulan II tahun 2025 didukung beberapa program/kegiatan, yaitu :

- Inovasi Jempolan (Jemput Bola Balai POM di Balikpapan) yang membantu pendampingan kepada UMKM yang menjadi target UMKM dalam memenuhi standar.
- Kompetensi petugas yang Sebagian besar telah mengikuti kegiatan Penyuluh Keamanan Pangan untuk mendampingi UMKM Pangan Olahan.
- Sikap kooperatif yang ada dari pelaku usaha dalam mengikuti semua kegiatan pendampingan serta tahapan sesuai penilaian indikator.
- Pelaksanaan tahapan pendampingan yang telah ditargetkan pada triwulan II yaitu : Bimbingan Teknis
- Kolaborasi dengan program SAPA KAMPUS terdapat 8 mahasiswa teknologi pangan yang magang pada pelaku usaha UMKM Pangan Olahan.
- Proses pendaftaran dan permohonan yang tersistem melalui website memudahkan pelaku usaha untuk input data dan pengajuan sertifikasi atau pendaftaran izin edar.

Selain itu ada beberapa kendala yang terjadi pada UMKM dalam memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, yaitu :

- Keterbatasan Tempat produksi sarana dalam memenuhi syarat.
- Keterbatasan anggaran Pelaku usaha dalam melakukan membuat atau merenovasi tempat produksi agar dapat memenuhi ketentuan
- Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aspek pemenuhan cara pembuatan obat dan makanan yang baik
- Kesulitannya pelaku usaha obat Bahan Alam dan kosmetik dalam memenuhi

- persyaratan adanya penanggung jawab teknis (TTK maupun Apoteker)
- Keterbatasan pelaku usaha dengan perangkat elektronik dan keterbatasan sumber daya di sarana.

Internal Process Perspective

SS5 **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

3.5 SASARAN KEGIATAN 5

3.5.1 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan secara berkelanjutan terus meningkatkan kinerja penegakan hukum di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan. Penilaian indikator sasaran strategis ini berdasarkan tingkat Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan dengan komponen sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
2. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap I).
3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Perkara oleh JPU (P21).
4. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU untuk disidangkan oleh pengadilan (Tahap II).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Pencapaian sasaran strategis ketiga pada tahun 2025 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Triwulan 2 Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	-----------	-----------	---------	----------

Meningkatnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	56,67	103,04	Sangat Baik
---	---	----	-------	--------	--------------------

Tabel 3.51 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025

Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan pada TW II tahun 2025 memiliki 55% target, namun pada bulan Juni 2025 dilakukan penyesuaian target sehingga tercapai realisasi sebesar 56,67% dengan capaian sebesar 103,04 dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dan Target Tahun Anggaran 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	94	56,67	60,29	 Perlu Upaya keras

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan Target Tahun Anggaran 2025

Pada TW II tahun 2025 Balai POM di Balikpapan telah mencapai realisasi capaian sebesar 60,29 yang dikategorikan “perlu upaya keras” untuk mencapai target Tahun 2025.

Berikut hal-hal yang mendukung tercapainya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan:

1. Kerjasama yang baik antara Balai POM di Balikpapan dengan lintas sektor, diantaranya Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Kepolisian Kabupaten Resor Penajam Paser Utara, Kepolisian Resor Kabupaten Paser, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Balikpapan, Lanal Balikpapan, KPPBC Tipe B Balikpapan serta Jasa Ekspedisi di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaporan pengaduan terkait tindak pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terjadi di wilayah

kerja Balai POM di Balikpapan.

3. Tersedianya alat pengolah data yang memadai.

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penindakan diantaranya:

1. Adanya efisiensi anggaran tahun 2025.
2. Jumlah personil penindakan terbatas.
3. Adanya intervensi dari beberapa pihak terkait.
4. Terdapat wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan di Kabupaten Paser yang sulit dijangkau serta tidak memiliki akses darat.
5. Jarak tempuh wilayah pengawasan di Kabupaten Paser membutuhkan waktu yang cukup panjang dari Kota Balikpapan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait, guna menunjang terselesainya perkara.
2. Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait, guna penanganan barang kiriman dengan tujuan wilayah sulit dijangkau ataupun membutuhkan jarak tempuh cukup panjang dari Kota Balikpapan.
3. Perkuatan kerjasama dengan jasa kirim di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.
4. Penyesuaian target tahunan Balai POM di Kota Balikpapan dimana target pada tahun 2025 adalah 1 perkara, menjadi 3 perkara dengan rincian 1 perkara sampai tahap 1 atau penyerahan berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). 1 perkara di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dikarenakan kurangnya alat bukti dan 1 perkara sampai di tahap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

3.6 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 6

Pencapaian sasaran strategis ke enam pada tahun 2025 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja SK 6 pada Triwulan II mencapai target dengan realisasi 100%.

6.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar terdiri dari:

1. Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Balai POM di Kota Balikpapan.
2. Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Cegah Tangkal.
3. Laporan Siber yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kota Balikpapan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tercapainya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	56	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran				100,00%	Baik

Tabel 3.61 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan 1 Tahun 2025

Pada TW II Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memiliki target sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50% dan memiliki capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dan Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	 Tercapai / melampaui

Tabel 3.62 Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dan Target Tahun 2025

Pada TW II tahun 2025 Balai POM di Balikpapan telah mencapai realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 50% dan capaian 100% dengan kategori tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berikut hal-hal yang mendukung tercapainya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai:

1. Ketersediaan alat pengolah data yang memadai
2. Tersedianya aplikasi pendukung yang memadai

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penindakan diantaranya:

1. Adanya efisiensi anggaran tahun 2025.
2. Kompetensi petugas dalam penulisan jurnal atau laporan analisis masih terbatas.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Peningkatan kompetensi petugas secara mandiri terkait OSINT

2. Peningkatan kompetensi menulis bagi petugas penindakan.

Internal Process Perspective

SS7 Layanan Publik Balai POM di Balikpapan yang prima

3.7. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Balikpapan

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Hasil penilaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Balikpapan akan dinilai oleh Tim Penilai UPP BPOM yang akan dilakukan pada Triwulan ke IV 2025

3.8 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 8

Pencapaian sasaran strategis ke-delapan pada tahun 2025 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja SK 8 diukur pada Triwulan II Tahun 2025.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT	50	50	99,50%	Baik
	Nilai AKIP UPT	-	-	-	Belum dinilai
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Belum dinilai
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Belum dinilai
Nilai Pencapaian Sasaran				100,00%	Baik

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Triwulan II Tahun 2025

3.8.1 Presentase Implementasi Rencana Aksi RB Dilingkup UPT

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan

evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian mandiri pembangunan ZI (PMPZI) menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat. yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM meliputi :

1. Manajemen Perubahan : bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen hasil satker/unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM meliputi :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi	Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	-------------	-----------	---------	----------

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	50	100,00	Baik
---	---	----	----	--------	------

Tabel 3.8.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT

Target Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT Triwulan II Tahun 2025 sebesar 50% dengan realisasi Triwulan II tahun 2025 sebesar 50% maka diperoleh capaian Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT Triwulan II tahun 2025 sebesar 100,00% nilai tersebut belum mencapai target tahunan namun termasuk kedalam kategori “**Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT	100	50	 50%	Perlu Upaya keras

Tabel 3.8.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT

Realisasi implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT Triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 50% terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya keras”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja, Kendala, dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan & (Rekomendasi Perbaikan)

Berdasarkan rencana pelaksanaan Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT pada tahun 2025, untuk target pada Triwulan I telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan dengan data dukung yang lengkap juga tidak ditemukan kendala

yang cukup signifikan yang dapat menghambat penyelesaian target pekerjaan pada Triwulan II. Hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu selalu memperhatikan rencana aksi yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada rencana aksi yang terlewat untuk dilakukan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025 didukung dengan komitmen dari Kepala Balai POM di Balikpapan beserta seluruh pegawai untuk melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan bersama.

3.8.2 Nilai AKIP UPT Balai POM di Balikpapan

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

Cara perhitungannya menggunakan Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
----	----------	-------

1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Periode pelaporan untuk nilai AKIP ini adalah Tahunan, sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II tahun 2025.

3.8.3 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 3 aspek dan 8 indikator; aspek tersebut adalah: (a) kualitas perencanaan anggaran, (b) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (c) kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ada 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman IIII DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi Penyampaian SPM
8. Konfirmasi Capaian Output

Indikator revisi DIPA dan penyerapan anggaran tidak dihitung dalam penilaian IKPA Triwulan I tahun 2025.

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diukur berdasarkan 4 aspek

yaitu: (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, (c) capaian RO, dan (d) nilai efisiensi.

Nilai IKPA Balai POM di Balikpapan di Triwulan II tahun 2025 adalah 97,46. Adapun Pengukuran Bobot Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Belum dinilai

Tabel 3.8.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB dilingkup UPT

Pada tabel diatas, Target Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 0% dengan Realisasi Triwulan II tahun 2025 sebesar 0% maka diperoleh capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan Triwulan II tahun 2025 sebesar 0% dengan kriteria “**Belum dinilai**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
------------------	-------------------	--------	-----------	---------	----------

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Balikpapan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan	5	0		0	Perlu Upaya Keras
---	--	---	---	---	---	-------------------

Tabel 3.10.2 Tabel Perbandingan Target Tahunan dan realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM Balikpapan Triwulan II tahun 2025 memiliki capaian 0 terhadap target tahun 2025 dengan kategori capaian “Perlu Upaya Keras”. Kinerja di triwulan selanjutnya harus ditingkatkan serta dioptimalkan sehingga target tahun 2025 dapat tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja, Kendala, dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan & (Rekomendasi Perbaikan)

Nilai IKPA pada Triwulan II Tahun 2025 ditetapkan dari capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari aplikasi OM SPAN sebesar 97,46%. dengan (bobot nilai = 50%),

Nilai EKA pada Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan realisasi volume keluaran dan presentase realisasi indikator keluaran kegiatan sebesar 0%. dengan (bobot nilai = 50%).

Dari capaian nilai IKPA dan EKA dapat dihitung Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan Triwulan II tahun 2025 adalah 97,46%, persentase capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan Triwulan II belum dapat dinilai karena penilaiannya akan dilaksanakan pada akhir TW IV.

3.8.4 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Balikpapan

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen

risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Periode pelaporan untuk nilai Indeks Manajemen Risiko ini didapat dari Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama yang akan diperoleh pada akhir tahun, sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II tahun 2025.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan kegiatan sampling sesuai dengan pedoman sampling dan rencana pelaksanaan	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksanaan hingga pelaporan	TW 4	Tidak ditemukan sampel sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat
2	Persentase pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Revisi anggaran dan exercise target efisiensi	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksanaan hingga pelaporan	TW 4	Tidak ditemukan sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Sampel keracunan pangan olahan yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dengan lintas sector jika terdapat kejadian KLB pangan	TW 4	-	Meningkatkan koordinasi dengan PIC KLB-KP di Dinas Kesehatan	TW 4	Sampel KLB keracunan pangan olahan yang diuji sesuai standar
4	Persentase PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT yang ditindaklanjuti tidak sesuai ketentuan	Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait sosialisasi dan monitoring peraturan perundang-undangan PIRT dan produknya	TW 4	-	Melakukan proses sampling sesuai pedoman sampling dari pelaksanaan hingga pelaporan	TW 4	Sampel PIRT pangan olahan yang diuji sesuai standar
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan lintas sektor terkait urgensi terhadap respon surat tindak lanjut	Refreshment kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait feedback surat tindak lanjut	TW 1 dan TW 3	Melakukan kegiatan refreshmen/sosialisai kepada pelaku usaha	Melakukan kegiatan refreshmen/sosialisai kepada lintas sektor	TW 3	CAPA dari pelaku usaha yang dikirim sesuai timeline dan feedback surat dari lintas sektor
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kegiatan inspeksi belum terlaksana	Inventarisasi sarana produksi yang aktif dan perencanaan pelaksanaan inspeksi Melakukan kegiatan inspeksi	TW I TW 4	Dilakukan inventarisasi sarana dan perencanaan -	- Melakukan kegiatan inspeksi	- TW 4	Terdapat data sarana dan analisis perencanaan inspeksi -
7	Persentase sarana	Pelaksanaan telah	Monitoring pelaksanaan	TW 1 -	-	Melakukan monitoring	TW 1 -	Tercapainya sarana

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	dilakukan tepat waktu	secara berkala terhadap perencanaan	TW 4		pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan Melakukan refreshment pedoman kepada petugas dan monitoring secara berkala	TW 4	produksi yang diperiksa sesuai ketentuan
		Pengambilan Kesimpulan hasil pemeriksaan telah sesuai pedoman	refreshment pedoman kepada petugas dan monitoring secara berkala	TW 2 - TW 4	-		TW 2 - TW 4	Tercapainya sarana produksi yang diperiksa sesuai ketentuan
8	Persentase Sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan fasilitas distribusi Sediaan Farmasi dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan	Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang peraturan peredaran sediaan farmasi saat pemeriksaan	TW 4	-	Memberikan informasi tentang peraturan peredaran sediaan farmasi	TW 4	Tidak ditemukan sarana distribusi sediaan farmasi dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana distribusi Pangan Olahan dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan	Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang peraturan peredaran pangan olahan saat pemeriksaan	TW 4	-	Memberikan informasi tentang peraturan peredaran pangan olahan	TW 4	Tidak ditemukan sarana distribusi pangan olahan dengan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan telah dilakukan tepat waktu	Monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW 1 - TW 4	-	Melakukan monitoring pelaksanaan secara berkala terhadap perencanaan	TW 1 - TW 4	-
		Pengambilan Kesimpulan hasil pemeriksaan telah sesuai pedoman	Melakukan refreshment pedoman kepada petugas dan monitoring secara berkala	TW 2 - TW 4	-	Melakukan refreshment pedoman kepada petugas dan monitoring secara berkala	TW 2 - TW 4	-
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Kompetensi laboratorium hanya di komoditi pangan	Komponen standar kompetensi laboratorium dapat ditingkatkan dengan adanya pengujian komoditi Obat dan NAPPZA	TW 2	Pengujian komoditi Obat dan NAPPZA	-	TW 2	Nilai pemenuhan lab telah mencapai target
		Ruang lingkup laboratorium hanya di komoditi pangan	Komponen standar ruang lingkup laboratorium dapat ditingkatkan dengan adanya pengujian dan verifikasi komoditi Obat dan NAPPZA	TW 2	Pengujian dan verifikasi komoditi Obat dan NAPPZA	-	TW 2	Nilai pemenuhan lab telah mencapai target

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Materi videotron masih umum Konten yang diunggah masih belum dilakukan di jam yang sama setiap harinya Pelaksanaan KIE tatap dihadiri oleh masyarakat dengan berbagai usia dan latar belakang pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap informasi	KIE melalui media videotron bisa dibuat lebih bervariasi dengan menambahkan materi yang tidak terlalu umum namun dapat dimengerti oleh masyarakat KIE melalui media sosial lebih disiplin dalam melakukan upload konten dijam yang sudah ditentukan Pemilihan peserta KIE melalui tatap muka disesuaikan dengan acara KIE yang akan dilakukan.	TW 3 TW 2 - TW 4 TW 2	- - Perlu dilakukan pemilihan peserta KIE yang sesuai	Pembuatan materi videotron Pemberitahuan Kembali kepada PIC media sosial untuk lebih disiplin waktu dalam hal mengunggah konten,.	TW 3 TW 2 - TW 4 TW 2	- - meningkatkan nilai KIE dalam pengisian survei dan responden
13	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan Akan dilakukan pada TW II	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Capaian sudah sesuai target dan juknis pelaksanaan Sekolah Pangan Aman dari PMPUPO. Per bulan Junii telah terealisasi 75%	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai timele
14	Jumlah Desa Pangan Aman	Kegiatan Akan dilakukan pada TW II	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Capaian sudah sesuai target dan juknis pelaksanaan Desa Pangan Aman dari PMPUPO. Per bulan Junii telah terealisasi 75%	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan sesuai timele
15	Jumlah pasar pangan aman	Kegiatan Akan dilakukan pada TW	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Pada bulan juni capaian target	Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai timeline	TW 3	Diharapkan seluruh tahapan kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	berbasis komunitas	II			mencapai 75%, dan pada bulan juli direncanakan mencapai 100%			dapat diselesaikan sesuai timele
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Terdapat beberapa tahapan pendampingan yang belum dilaksanakan pada triwulan I	Melaksanakan tahapan penadmpingan sesuai dengan target pembobotan, seperti bimbingan teknis	TW 3	Tahapan pendampingan pelaku usaha dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang ditentukan	-	TW 3	-
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Perkuatan sinergitas dengan lintas sektor terkait guna menunjang terselesainya perkara	Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	TW 4	-	Koordinasi dengan lintas sektor terkait penegakan hukum di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	TW 4	-
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Peningkatan kompetensi petugas secara mandiri terkait OSINT	Pengembangan kompetensi terkait OSINT secara mandiri melalui online	TW 4	-	Pengembangan kompetensi terkait OSINT secara mandiri melalui online	TW 4	-
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Target akan dinilai di B12	-	-	-	-	-	-
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	Target akan dinilai di B12	-	-	-	Masih ada kendala dalam penginputan Capaian Output pada periode triwulan I	-	-
22	Indeks Manajemen	Target akan dinilai di	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Tindak Lanjut			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai*	Belum**		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
	Risiko UPT BPOM	B12						
23	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Target akan dinilai di B12	Melaksanakan kegiatan Rencana Aksi RB sesuai dengan timeline yang telah ditentukan	TW 3	-	Melanjutkan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan	TW 3	-

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Balai POM di Balikpapan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.956.412.000.-. Pada Triwulan II ini terealisasi sebesar Rp. 1.380.669.676,- atau terealisasi sebesar 27,86% dari total pagu anggaran.

Tabel. 3.3.1 Realisasi Volume dan Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	3165.AEA.001 Laporan Analissi Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7	50.00	45,851,000	5,660,600	12.35
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	12	6	50.00	79,937,000	4,580,000	5.73
3	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	142	76	53.52	89,442,000	4,056,000	4.53
4	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Dan Makanan	1	0.5	50.00	112,000,000	11,552,654	10.31
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan Dan Mutu Obat dan Makanan	18	8	44.44	42,000,000	1,684,312	4.01
6	3165.CAB.002 Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	9	2	22.22	40,000,000	1,883,490	4.71
7	3165.CAN.001 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	6	0	0.00	80,000,000	-	-
8	3165.CBV Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0.00	919,275,000	-	-
9	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat Dan Makanan yang Sesuai Good Laboratory Practice	1	0.5	50.00	237,363,000	63,031,149	26.55

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
10	3165.QCD.U38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	1	1	100.00	137,269,000	63,142,075	46.00
11	3165.QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0.375	18.75	93,870,000	6,711,664	7.15
12	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	1	0.75	75.00	161,258,000	25,331,423	15.71
13	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0.75	75.00	105,920,000	9,218,980	8.70
11	3165.QDG.001 UMKM yang Didampingi dalam Pemenuhan Standar	6	2	33.33	40,034,000	5,107,369.00	12.76
12	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa	78	44	56.41	34,663,000	11,484,373	33.13
13	3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan Dan Makanan Yang Diperiksa	152	76	50.00	64,601,000	19,721,182	30.53
14	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	19	8	42.11	19,139,000	1,360,000	7.11
15	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	237	89	37.55	219,211,000	58,997,321	26.91
16	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	0	0.00	8,000,000	-	-
17	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0.5	50.00	2,426,579,000	1,087,147,109	44.80

Tabel. 3.3.2 Realisasi Volume dan Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis			
			Target TW II	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.50	95.37	117.02	57,551,000	19,721,182	34.27
		2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	76.67	102.23	10,041,500	5,742,187	57.18
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	-	0.00	10,041,500	5,742,187	57.18
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	80.00	106.67	14,580,000	-	0.00
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	60.00	78.57	130.95	7,050,000	-	0.00
		6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	-	0.00	19,139,000	1,360,000	7.11
		7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	100.00	5,820,000	-	0.00
		8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	85.77	92.47	192,731,000	57,467,321	29.82
		9	Persentase sarana distribusi Pangan	85.00	83.33	98.04	18,960,000	1,530,000	8.07

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW II	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
		Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
		10 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	95.86	120.81	1,700,000	-	0.00
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	11 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10.20	10.44	102.35	237,363,000	63,031,149	26.55
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	12 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.50	86.94	100.51	131,442,000	5,740,312	4.37
		13 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75.00	75.00	100.00	93,870,000	6,711,664	7.15
		14 Jumlah desa pangan aman	75.00	75.00	100.00	161,258,000	25,331,423	15.71
		15 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	87.50	75.00	85.71	105,920,000	9,218,980	8.70
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	16 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50.00	50.00	100.00	40,034,000	5,107,369	12.76
5	Terlaksananya Penindakan	17 Persentase Keberhasilan	55.00	56.67	103.04	137,269,000	63,142,075	46.00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target TW II	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	45,851,000	5,660,600	12.35
7	Layanan Publik UPT yang prima	19 Indeks Pelayanan Publik UPT	-		-	79,937,000	4,580,000	5.73
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	20 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50.00	50.00	100.00	1,015,575,000	11,552,654	1.14
		21 Nilai AKIP UPT BPOM	-		-	1,252,180,000	491,163,064	39.22
		22 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-		-	1,311,579,000	597,867,535	45.58
		23 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-		-	6,520,000	-	0.00

Pengelolaan anggaran Balai POM di Balikpapan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Balikpapan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi %capaian output terhadap %capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Balikpapan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Balikpapan Triwulan II 2025

No.	Rincian Output	Capaian Target		IE	SE	TE	Kategori
		Input	Output				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	34.27	117.02	3.41	1	2.41	Tidak Efisien
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.18	102.23	1.79	1	0.79	Efisien
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	57.18	100.00	1.75	1	0.75	Efisien
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	106.67	-	1	-	-
5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0.00	130.95	-	1	-	-
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	7.11	0.00	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0.00	100.00	-	1	-	-
8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29.82	92.47	3.10	1	2.10	Tidak Efisien
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8.07	98.04	12.15	1	11.15	Tidak Efisien
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	0.00	120.81	-	1	-	-
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	26.55	102.35	3.85	1	2.85	Tidak Efisien
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4.37	100.51	23.01	1	22.01	Tidak Efisien
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7.15	100.00	13.99	1	12.99	Tidak Efisien

14	Jumlah desa pangan aman	15.71	100.00	6.37	1	5.37	Tidak Efisien
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8.70	85.71	9.85	1	8.85	Tidak Efisien
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12.76	100.00	7.84	1	6.84	Tidak Efisien
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	46.00	103.04	2.24	1	1.24	Tidak Efisien
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	12.35	100.00	8.10	1	7.10	Tidak Efisien
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	5.73	-	-	1	-	-
20	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	1.14	100.00	87.91	1	86.91	Tidak Efisien
21	Nilai AKIP UPT BPOM	39.22	-	-	1	-	-
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	45.58	-	-	1	-	-
23	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	-	-	1	-	-

Pada Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Balikpapan melaksanakan 23 (dua puluh tiga) indikator kegiatan utama (IKU) untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis dengan hasil 2 IKU dalam kategori “Efisien” , 13 IKU Tidak Efisien dan 8 IKU perhitungan efisiensinya belum bisa dinilai. Sebagian besar ketidakefisienan ini terjadi dikarenakan oleh besarnya deviasi antara capaian output dan capaian input serta ada capaian fisik kegiatan yang belum terealisasi di triwulan II ini, juga dikarenakan adanya efisiensi (blokir anggaran) sejak awal DIPA tahun 2025 diterbitkan, dan mengalami perubahan baik restrukturisasi efisiensi (penambahan blokir anggaran) hingga relaksasi efisiensi (pembukaan sebagian blokir anggaran), yang pelaksanaan revisinya dalam waktu berdekatan, sehingga Balai POM di Balikpapan harus menunda pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada unit pemangku kegiatan / indikator kinerja di pusat, untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan anggaran efektif yang tersedia.. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 86,91. Kegiatan mempunyai TE yang tinggi karena terdapat capaian progres yang masih kosong atau sedikit dengan

penyerapan anggaran yang rendah ataupun sebaliknya.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumberdaya (Anggaran maupun SDM) terbatas, Balai POM di Balikpapan mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output atau capaian fisik dan input dalam bentuk realisasi anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja Interim Triwulan II tahun 2025 Balai POM di Balikpapan menyajikan hasil pengukuran terhadap 8 (depalan) Sasaran Kegiatan dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 117,02% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 102,237% dengan kriteria **Sangat Baik**
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT sebesar 0% (Tidak ada kasus KLB)
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 106,67% dengan kriteria **Sangat Baik**
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 130,95% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 0% (Tidak ada realisasi)
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,47 dengan kriteria **Baik**
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 98,04% dengan kriteria **Baik**

- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 120,81% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 102,35% dengan kriteria **Sangat Baik**
 3. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan pangan olahan sebesar 100,51% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 85,71% dengan kriteria **Baik**
 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 103,04% dengan kriteria **Sangat Baik**
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
7. Layanan Publik UPT yang prima di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
- Indeks Pelayanan Publik UPT (Penilaian pada akhir tahun)
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Balikpapan yang optimal diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Persentase implementasi rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai POM di Balikpapan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Nilai AKIP UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Indeks Manajemen Risiko UPT (Penilaian pada akhir tahun)

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan di tahun 2025 ini memiliki **kendala-kendala** sebagai berikut :

1. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha/pemangku kepentingan dalam melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian.
2. Tindakan perbaikan dan pencegahan oleh pelaku usaha/pemangku kepentingan tidak dilakukan secara konsisten
3. Adanya keputusan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
4. Sarana produksi yang diperiksa belum dientry datanya ke SIPT

5. Adanya perubahan DO, dimana Nilai EKA tidak lagi dinilai perbulan, penilaian dilakukan pada akhir tahun
6. Makin banyaknya sampling dengan metode online yang menyulitkan dalam penilaian penandaan
7. Renlak pemeriksaan difokuskan pada sarana produksi yang belum pernah diperiksa, dan saat pemeriksaan memberikan hasil tidak memenuhi ketentuan
8. Belum dilakukan Bimbingan Teknis untuk komoditi Obat Tradisional dan Kosmetik
9. Terdapat peserta KIE yang mengisi skala "kurang berminat" pada poin minat dalam mengikuti kegiatan KIE
10. Jumlah sampel yang disampling dan diuji belum mencapai 50% dari target tahunan karena adanya beberapa sampel yang belum selesai uji.

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Interim Triwulan II Tahun 2025, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk berkomitmen dalam menerapkan perbaikan pada ketidaksesuaian
- Memberikan peringatan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi ke UPT Badan POM
- Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- Refreshment terkait pedoman evaluasi penandaan kepada petugas evaluasi penandaan
- Melibatkan SDM dari fungsi lain dalam kegiatan sampling (DK/LK).
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sampling dan pengujian yang telah disusun, jika ada hambatan seperti alat laboratorium yang rusak, reagen/bahan penunjang belum tersedia agar dikomunikasikan kepada petugas sampling sebelum kegiatan sampling

- dilakukan.
- Bimtek persyaratan penandaan label dan iklan produk kosmetik kepada pelaku usaha
 - Meningkatkan Sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder
 - Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan
 - Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat
 - Menggencarkan promosi penggunaan tagline cek KLIK, Kata BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media
 - Melakukan pembaharuan website BPOM agar lebih menarik dan user friendly bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIE.
 - Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei dan rekomendasi hasil pengukuran indeks untuk peningkatan kesadaran masyarakat kedepannya
 - Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kesadaran masyarakat di tahun mendatang.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GERSON PARARAK

Jabatan : Kepala Balai POM di Balikpapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 08 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Balikpapan

GERSON PARARAK

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.5 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35 %
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.5 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Lembaga
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Lembaga
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Lembaga
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Laporan
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Indeks
8.	09 - Meningkatkan pelayanan publik di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	77.2

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.35 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 4,956,412,000 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,521,833,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,434,579,000

Balikpapan, 08 April 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di
Balikpapan

GERSON PARARAK

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	81.5	57,551,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	10,041,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10,041,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	14,580,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	75	89.5	7,050,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	19,139,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	5,820,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	92.75	192,731,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	18,960,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	79.35	1,700,000
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).			9.8	9.8	9.8	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	11	237,363,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	131,442,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				75	75	75	100	100	100	100	100	2	93,870,000
		03 - Jumlah desa pangan aman				50	75	75	100	100	100	100	100	1	161,258,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	75	87.5	100	100	100	100	100	1	105,920,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	5	15	20	25	40	50	60	70	75	80	87.3	40,034,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						15	55	85	94	94	94	94	137,269,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,851,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.2	79,937,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.2	1,252,180,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,311,579,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.35	6,520,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5	15	25	30	40	50	55	65	75	80	90	100	1,015,575,000
Total														4,956,412,000	

Balikpapan, 08 April 2025

Kepala Balai POM di Balikpapan



GERSON PARARAK

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Balikpapan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 19 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
BALIKPAPAN



GERSON PARARAK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR PR.06.02.23C.09.24.106 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN

MAKANAN DI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93,5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
9	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
10	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	74,29
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89,82
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA BALIKPAPAN



GERSON PARARAK

LAMPIRAN

CAPAIAN RAPK TRIWULAN II BALAI POM DI BALIKPAPAN

No	Kode SS	Sasaran Strategis	Kode IKK	Indikator	Target Tahunan	Target Bulanan N	Realisasi	% Capaian Thd Target Bulan N	% Capaian Thd Target Tahunan	Kriteria Capaian thd Target bulan n
1	SK.1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81.5	81.5	95.37	117.02	117.02	Tidak dapat disimpulkan
2	SK.1		1.2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	76.67	102.23	102.23	Sangat Baik
3	SK.1		1.3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0.00	0.00	Tidak ada KLB
4	SK.1		1.4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	80	106.67	106.67	Sangat Baik
5	SK.1		1.5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	60	78.57	130.95	87.79	Tidak dapat disimpulkan
6	SK.1		1.6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	0	0.00	0.00	Tidak ada realisasi
7	SK.1		1.7	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	100.00	100.00	Baik
8	SK.1		1.8	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	85.77	92.47	92.47	Baik
9	SK.1		1.9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	83.33	98.04	98.04	Baik
10	SK.1		1.10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.35	79.35	95.86	120.81	120.81	Tidak dapat disimpulkan
11	SK.2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	10.2	10.44	102.35	94.91	Sangat Baik
12	SK.3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.5	86.5	86.94	100.51	100.51	Sangat Baik
13	SK.3		3.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	75	100.00	-	Baik
14	SK.3		3.3	Jumlah desa pangan aman	1	75	75	100.00	-	Baik
15	SK.3		3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	87.5	75	85.71	-	Baik
16	SK.4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3	50	50	100.00	57.27	Baik
17	SK.5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	94	55	56.67	103.04	60.29	Sangat Baik
18	SK.6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	Baik
19	SK.7	Layanan Publik UPT yang prima	7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun
20	SK.8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	8.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	50	50	99.50	49.75	Baik
21	SK.8		8.2	Nilai AKIP UPT BPOM	77.2	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun
22	SK.8		8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun
23	SK.8		8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.35	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	81,50	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00	79,44
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	81,50	80,00	93,33	90,00	92,00	88,83	
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	81,50	97,78	87,50	93,33	87,69	91,58	
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	81,50	100,00	89,33	95,00	91,43	93,94	
660471	Balai POM di Balikpapan	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	81,50	96,88	94,12	96,00	94,48	95,37	

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Januari		-	-	-	-	-	-	-	-		
Februari		75,00	-	-	-	-	-	-	-		
Maret		75,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	80,00		
April		75,00	100,00	100,00	15,38	100,00	0,00	100,00	73,08	Sampling dilakukan akhir April sehingga masih dalam proses pengujian dan belum terdapat kesimpulan hasil pengujian	Menyampaikan hasil sampling jika hasil pengujian sudah keluar
Mei		75,00	100,00	100,00	66,67	96,77	66,67	100,00	89,68	Dari 15 sampel ada 10 sampel yang sudah dilaporkan	Melakukan follow up dan melaporkan hasil sampling jika hasil sudah keluar
Juni		75,00	50,00	100,00	55,56	100,00	55,56	100,00	76,67	UPT belum melakukan pengujian rapid tes dan masih terdapat sampel yang belum selesai pengujian di balai regional.	Akan melakukan rapid tes pada TW selanjutnya. Melakukan follow up dan melaporkan hasil sampling jika hasil sudah keluar

4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Januari	75,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Februari	75,00	100,00	100,00	100,00	33,33	50,00	100,00	88,33		
Maret	75,00	100,00	100,00	100,00	33,33	50,00	100,00	88,33		
April	75,00	100,00	100,00	100,00	33,33	50,00	100,00	88,33	Tidak ada target sampling sesuai relik upt	Sampling PIRT akan dilakukan kembali pada bulan Mei sesuai relik setelah relaksasi anggaran
Mei	75,00	100,00	100,00	100,00	33,33	33,33	100,00	86,67		
Juni	75,00	100,00	100,00	33,33	100,00	33,33	100,00	80,00	Sampel belum selesai uji pada laboratorium regional	melakukan follow up dan melaporkan hasil uji jika sudah sesuai

5. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
690471	Balai POM di Balikpapan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	20,00	55,56	100,00	77,78	Pelaku usaha belum menyelesaikan semua perbaikan dari ketidaksesuaian	Melakukan remainder kepada pelaku usaha
690471	Balai POM di Balikpapan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	25,00	25,00	66,67	45,83	Pelaku usaha belum menyelesaikan semua perbaikan dari ketidaksesuaian	Melakukan remainder kepada pelaku usaha
690471	Balai POM di Balikpapan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	50,00	30,00	80,00	55,00	Pelaku usaha belum menyelesaikan semua perbaikan dari ketidaksesuaian	Melakukan remainder kepada pelaku usaha
690471	Balai POM di Balikpapan	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	60,00	57,14	100,00	78,57	Pelaku usaha belum menyelesaikan semua perbaikan dari	Melakukan remainder kepada pelaku usaha

6. Presentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW selanjutnya
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW selanjutnya
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW selanjutnya
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW IV
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW IV
600471	Balai POM di Balikpapan	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	tidak ada sarana produksi di wilayah pengawasan pada beberapa komoditi dan belum ada target pada sarana existing pada bulan berjalan	sarana produksi existing direncanakan untuk diawasi pada TW IV

7. Presentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Kelepatan Grading	Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	Januari	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	belum terdapat inspeksi karena proses perencanaan sesuai rencana	belum terdapat inspeksi karena proses perencanaan sesuai rencana
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	Februari	80,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	terdapat blokir anggaran sehingga inspeksi dibatasi	follow up pembukaan blokir anggaran dan perencanaan desk inspection
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	Maret	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	terdapat pemberian grading yang kurang tepat	socialisasi terkait grading sarana ke petugas pengalihan target
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	April	80,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	1,00	2,00	50,00	83,33	100,00	83,33	tidak terdapat pemeriksaan sarana karena terdapat kegiatan lain yang lebih mendesak	negosiasi dengan koordinator terkait pembagian SDM untuk pemeriksaan rutin
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	Mei	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	terdapat sarana yang belum diinput sist sehingga belum diberikan grading	follow up ke petugas terkait
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan	Juni	80,00	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	2,00	5,00	40,00	80,00	100,00	80,00		

8. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Januari	92.75	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
Februari	92.75	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
Maret	92.75	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
April	92.75	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Mei	92.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Juni	92.75	94.05	81.25	87.50	80.26	85.77

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Januari		85	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Persentase sarana distribusi Februari		85	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Persentase sarana distribusi Maret		85	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Persentase sarana distribusi April		85	7	7	20,00	7	7	70,00	7	7	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Mei		85	11	11	20,00	11	11	70,00	11	11	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Juni		85	15	15	20,00	12	15	56,00	11	15	7,33	83,33

10. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklar Januari		79.35	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	88.00
Persentase Iklar Februari		79.35	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	97.00
Persentase Iklar Maret		79.35	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	99.00
Persentase Iklar April		79.35	100.00	97.84	96.30	100.00	93.73	97.57
Persentase Iklar Mei		79.35	102.94	97.54	97.10	100.00	92.62	98.04
Persentase Iklar Juni		79.35	100.00	91.83	103.03	100.00	88.48	96.67

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Hasil Penilaian		:			
No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL TW 1 (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	6.25	10.44	8	130.47
2.	Staandar Peralatan	25.00			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	20		9.8	
Target berdasar RAPK Ka UPT di Simetris					
Kendala Pemenuhan					
- Kapasitas listrik kurang, (apabila semua alat elektronik termasuk AC dinyalakan semua berbarengan dengan melakukan pengujian (alat lab nyala))					
- Chamber untuk pengujian yang tersedia ukuran 10x10 sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan verifikasi dan nilai Rf yang berbeda tiap lempeng dengan zat yang sama					
Rencana Tindak Lanjut :					
- Apabila akan melakukan pengujian maka ada beberapa alat elektronik atau AC yang dimatikan					
- Tahun 2025 sudah direncanakan pengadaan chamber 10x20 dan 20x20 namun karena efisiensi anggaran maka akan dilakukan pengadaan di tahun 2026					

12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Total Responden : 99
Indeks Rata-Rata/Final : 86.94

**** EFEKTIF ****



Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 51)			Indeks Survei MEDIA (total responden : 48)		
Average Values of	Skala 4	Skala 100	Average Values of	Skala 4	Skala 100
Narasumber/Petugas	3.804	95.098	Sumber Informasi	3.688	92.188
Konten/Informasi	3.667	91.667	Konten/Informasi	3.681	92.014
Pemahaman Audiens	3.196	79.902	Pemahaman Audiens	3.156	78.906
Manfaat	3.275	81.863	Manfaat	3.354	83.854
Indeks Tatap Muka	87.132		Indeks Media	86.741	

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum ada target di triwulan I	-
Februari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum ada target di triwulan I	-
Maret	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum ada target di triwulan I	-
April	75	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	75.00	-	-
Mei	75	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	75.00	-	-
Juni	75	25.00	25.00	25.00	0.00	75.00	75.00	-	-

14. Jumlah desa pangan aman

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari							0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	12	10,00				2	12,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	32	15,00	15,00			2	32,00
Jumlah Desa Pangan Aman	April	52	25,00	25,00			2	52,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	64	25,00	25,00	10,00		4	64,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	66	25,00	25,00	10,00		4	64,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	75	25,00	25,00	10,00	10,00	6	76,00

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala
Januari	0						0.00		Tidak ada target di triwulan 1
Februari	0						0.00		Tidak ada target di triwulan 1
Maret	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Tidak ada target di triwulan 1
April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		Advokasi Lintas Sektor Tanggal 15 April 2025
Mei	50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYULUHAN KOMUNITAS PASAR Tanggal 21 Mei 2025
Juni	75	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00		Sosialisasi Keamanan Pangan Untuk Komunitas Pasar

16. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Januari	0	0,00	5,00	0,00	5,00
Februari	5	0,00	10,00	5,00	7,50
Maret	15	15,00	10,00	15,00	13,33
April	20	45,00	10,00	15,00	23,33
Mei	25	50,00	10,00	25,00	28,33
Juni	50	55,00	40,00	55,00	50,00

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Januari	Januari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Februari	Februari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Maret	Maret	1	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan April	April	1	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Mei	Mei	1	1	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	0	55,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Juni	Juni	3	1	0	0,15	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	1	56,67

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

No	UPT	Data Masuk	Data Disetujui	Data Ditolak		Persentase Data Disetujui (%)
				Perlu Perbaikan	Tidak Perlu Perbaikan	
				<i>c</i>	<i>d</i>	
		<i>a</i>	<i>b</i>			$f = b/(a-d)$
12	Balai Besar POM di Padang	8	8	0	0	100,00%
13	Balai Besar POM di Palangka Raya	77	74	0	3	100,00%
14	Balai Besar POM di Palembang	24	22	0	2	100,00%
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	22	22	0	0	100,00%
16	Balai Besar POM di Pontianak	23	22	0	1	100,00%
17	Balai Besar POM di Samarinda	74	74	0	0	100,00%
18	Balai Besar POM di Semarang	68	60	0	8	100,00%
19	Balai Besar POM di Serang	49	37	2	10	94,87%
20	Balai Besar POM di Surabaya	394	377	17	0	95,69%
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	100	93	7	0	93,00%
22	Balai POM di Ambon	54	54	0	0	100,00%
23	Balai POM di Balikpapan	26	26	0	0	100,00%
	Balai POM di					